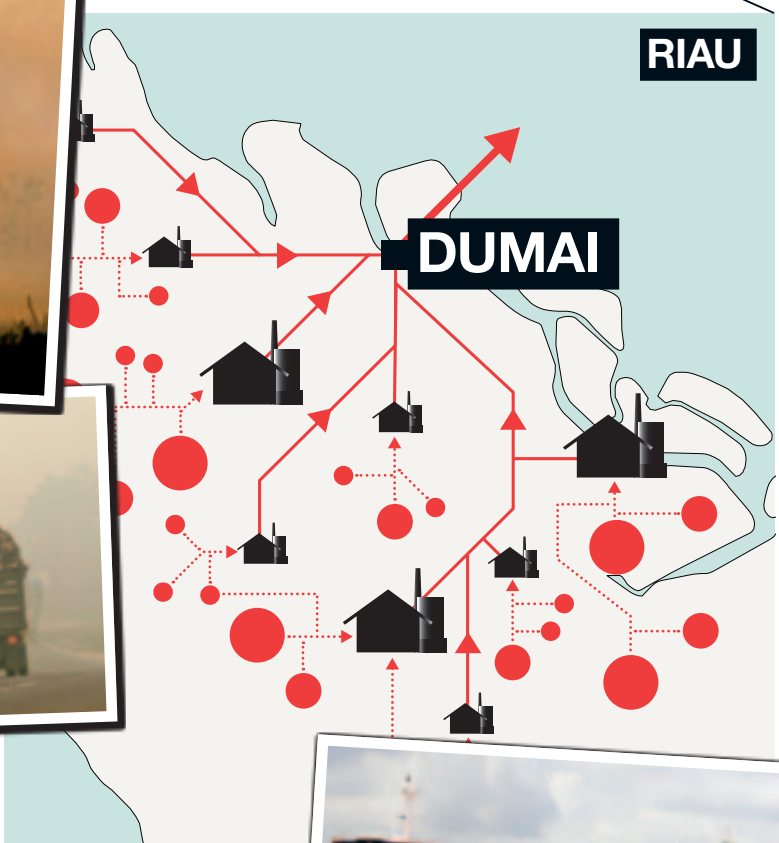


Bagaimana deforestasi dari perkebunan kelapa sawit mendorong harimau Sumatra menuju kepunahan

Izin Memusnahkan

GREENPEACE

Bagaimana Kelapa sawit yang kotor menjangkau Pasar Global di Indonesia



Amway NESTLE OIL

Mondelēz International

P&G

COLGATE-PALMOLIVE

Reckitt Benckiser

Godrej

TWINCRAFT SOAP

ARNOTT'S

Ringkasan Eksekutif

Saat ini hanya sekitar 400 ekor harimau diperkirakan tersisa di hutan-hutan hujan Sumatra – yang berkurang secara pesat – seperempat juta hektar tiap tahunnya. Ekspansi perkebunan kelapa sawit dan kayu pulp/HTI (Hutan Tanaman Industri) adalah penyebab hampir dua pertiga kerusakan habitat harimau dalam kurun waktu antara 2009 sampai 2011, periode paling akhir dimana data resmi pemerintah Indonesia tersedia. Kerusakan semacam ini memfragmentasi wilayah besar hutan ruang hidup harimau untuk berburu. Keadaan ini juga meningkatkan kontak dengan manusia; yang mengakibatkan meningkatnya perburuan harimau liar untuk perdagangan kulit dan obat-obatan tradisional serta meningkatnya serangan harimau yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dan harimau.

Menurunnya populasi harimau Sumatra adalah indikasi hilangnya hutan, keanekaragaman hayati dan juga kestabilan iklim. Musim kemarau ini kebakaran besar yang disengaja maupun tidak, berkobar di Sumatra terutama di provinsi Riau dan menghancurkan ratusan ribu hektar hutan hujan – termasuk hutan lahan gambut dalam yang merupakan habitat terakhir harimau di provinsi ini. Kebakaran tersebut tercatat memecahkan rekor yang mengakibatkan terlepasnya gas rumahkaca (GRK) dan polutan dalam jumlah besar dimana kabut asapnya yang jauh hingga mencapai Thailand.

Menurut pemerintah Indonesia, 85% dari emisi GRK negeri ini berasal dari perubahan peruntukan lahan (terutama yang berkaitan dengan deforestasi untuk perkebunan atau pertanian), dan sekitar separuhnya berkaitan dengan lahan gambut. Bahkan habitat harimau Sumatra dalam wilayah lindung seperti Taman Nasional Tesso Nilo yang terkenal di dunia telah dihancurkan oleh perambahan untuk produksi minyak kelapa sawit ilegal, dan pejabat pemerintah pun mengakui bahwa perlindungan wilayah ini hanya ada di atas kertas.

Hutan habitat harimau dalam konsesi perkebunan yang memiliki izin sama sekali tidak terlindungi. Satu juta hektar – 10% dari semua habitat harimau yang tersisa – tetap berisiko terhadap penebangan habis/perbersihan lahan dalam konsesi kelapa sawit dan pulp/HTI pada tahun 2011. Dalam periode 2009–2011, kelompok pulp dan kertas APRIL bertanggung jawab akan seperenam dari deforestasi habitat harimau. Dalam periode yang sama sektor kelapa sawit membatat seperempat habitat harimau yang tersisa dalam konsesi mereka.

Kegagalan ini menunjukkan bagaimana tidak adanya regulasi dan ekspansi yang tidak bertanggung jawab, terutama dari perkebunan kelapa sawit dan pulp/HTI. Hal ini melemahkan komitmen pemerintah Indonesia

untuk menghentikan deforestasi dan menyelamatkan harimau dan kehidupan liar lain yang terancam punah.

Investigasi Greenpeace mengungkapkan merek-merek terkenal termasuk Colgate Palmolive, Mondelez International (semula Kraft), Neste Oil, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser dan sejumlah perusahaan lain terkait dengan Wilmar International Ltd yang berbasis di Singapura dan perdagangan internasional minyak kelapa sawit kotor mereka. Wilmar adalah perusahaan pemroses minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan menguasai lebih dari sepertiga pangsa pasar pemrosesan kelapa sawit global dan dengan jaringan distribusi mencapai lebih dari 50 negara.

Meski Wilmar telah melaksanakan pelestarian hutan bernilai konservasi tinggi (high conservation value, HCV) dan lahan gambut dalam konsesi mereka sendiri, wilayah ini hanya memasok kurang dari 4% dari minyak kelapa sawit yang mereka suling dan perdagangan, sedangkan sisanya diproduksi oleh pemasok pihak ketiga. Berkaitan dengan Wilmar, Greenpeace telah mendokumentasikan kebakaran di hutan lahan gambut dalam di konsesi kelapa sawit; perusakan hutan hujan besar-besaran dan perkebunan kelapa sawit ilegal dalam Taman Nasional Tesso Nilo, yang hasil panennya telah terlacak masuk ke pabrik milik Wilmar dan terus mengisi rantai pasokan minyak kelapa sawit Indonesia; dan pembukaan besar-besaran hutan habitat harimau dan orangutan. Wilmar diketahui memiliki, menguasai saham mayoritas atau berdagang dengan sebagian besar produsen yang telah didokumentasi oleh Greenpeace terlibat dalam kegiatan tidak bertanggung jawab atau ilegal.

Minyak kelapa sawit memiliki banyak kegunaan dan manfaat, dan Greenpeace memahami ini; tapi produksi kelapa sawit juga dapat mendatangkan biaya/ongkos yang tidak bisa diterima. Di Indonesia, biaya yang harus ditanggung akibat produksi kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai regulasi termasuk perusakan hutan dan lahan gambut adalah hilangnya sumber hidup spesies terancam punah seperti harimau Sumatra dan orangutan.

Greenpeace percaya bahwa Wilmar dan merek-merek terkenal yang membeli minyak kelapa sawit mereka harus memahami biaya yang sebenarnya dari produksi minyak kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab. Mereka harus memastikan bahwa pasokan kelapa sawit mereka benar-benar memberikan sumbangan bagi pembangunan Indonesia, dan bukan menghancurkan masa depan penduduknya, kehidupan liarnya dan iklim global yang menjadi tumpuan harapan kita semua.

'Saya hendak menyatakan terimakasih saya kepada Greenpeace untuk kerja keras dan dedikasinya selama ini untuk dunia dalam usahanya bukan hanya menyelamatkan lingkungan tapi juga kehidupan dan masa depan kita. Terimakasih telah menjadi partner Indonesia. Sebagai partner maka ada kalanya kami dikritik apabila melakukan kesalahan, anda memberikan saran, anda mengusulkan solusi dan mengatakan hal-hal positif jika Indonesia melakukan hal yang benar. Dan secara pribadi saya melihat kolaborasi kita menunjukkan hasil yang baik [...] Saya ingin memberikan jaminan masa depan lingkungan yang bersih dan damai kepada cucu saya.'

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 7 Juni 2013

PT Rokan Adiraya
1°9'57.46"N 100°51'13.14"E





Daftar isi

Ringkasan Eksekutif	1
Hilangnya hutan Indonesia	4
Harapan terakhir harimau Sumatra	5
Sektor perkebunan mendorong pembukaan habitat harimau Sumatra	6
Apakah RSPO?	7
Orangutan juga terkena risiko kerusakan hutan	7
Fragmentasi hutan buruk bagi harimau	8
Kerusakan hutan habitat harimau akibat sektor perkebunan melemahkan komitmen Indonesia di dunia internasional tentang konservasi dan iklim	9
Prioritas pemerintah yang bertentangan	10
Studi Kasus	
1. Hilangnya habitat harimau menjadikan Riau rentan kebakaran	13
Target ekspansi perkebunan	13
Mengancam harimau dan lahan gambut	15
Penyebab kebakaran, kabut asap dan emisi karbon	16
2. PT Rokan Adiraya	17
3. PT Jatim Jaya Perkasa	18
4. APRIL adalah pendorong deforestasi terbesar untuk pulp	19
5. Kompleks Hutan Teso Nilo	23
Pemasok independen – asal usul yang tidak jelas	25
6. Wilmar / PT Agrindo Indah Persada	26
Ulasan mengenai Wilmar Group	28
Minyak kelapa sawit RSPO gagal melindungi para anggota Forum Barang Konsumen dari pengrusakan hutan	29
Solusi	30
Waktunya beraksi	31
Catatan Akhir	32
Daftar Pustaka	35

◀ Api melalap cabang pohon kering dalam lahan gambut yang baru saja ditebang habis di dalam konsesi kelapa sawit PT Rokan Adiraya Plantation.
©lfansasti/Greenpeace



Hilangnya hutan Indonesia

Menurut peta resmi Kementerian Kehutanan yang diberikan kepada Greenpeace pada tahun 2013, Indonesia kehilangan setidaknya 1.240.000 hektar (ha) hutan dalam periode antara 2009 dan 2011, atau setara dengan 620.000ha per tahunnya:¹ 40% dari kehilangan ini terjadi di Sumatra, dimana 230.000ha terjadi di provinsi, atau seperlima dari total deforestasi.

Sektor kelapa sawit adalah pendorong terbesar deforestasi pada periode 2009–2011, dimana konsesi-konsesi tersebut teridentifikasi menyumbang sekitar seperempat (300.000ha) dari hilangnya hutan.²

▲ Jalan akses dan fasilitas dalam lahan yang baru ditanami dalam konsesi kelapa sawit PT Tunggal Perkasa Plantation (Astra Agro Lestari) di Indragiri Hulu.
©Jufri/Greenpeace

Harapan terakhir harimau Sumatra

Saat ini, harimau Sumatra diklasifikasikan sebagai 'terancam punah secara kritis' dalam Daftar Merah Spesies Terancam punah IUCN – inventarisasi dunia paling komprehensif mengenai status konservasi spesies alam liar.³ Hanya sekitar 400 harimau Sumatra yang hidup di alam liar.⁴ Harimau adalah spesies indikator sebagai tanda vital akan kondisi kesehatan hutan. Ketika harimau tidak lagi dapat hidup di dalamnya, maka keberlangsungan kehidupan hutan dan spesies lain di dalamnya juga turut terancam.

Dahulu harimau dapat ditemui di sebahagian besar Sumatra, tetapi ekspansi perkebunan dan penebangan kayu telah mengurangi habitat primer dan mendesak mereka ke bentang hutan yang terisolasi dan ke sejumlah kecil taman nasional. Antara tahun 1985 dan 2011, separuh hutan alam Sumatra yang semula seluas 25 juta ha telah ditebang.⁵ Sekitar 80% dari hutan yang hilang tersebut merupakan hutan dataran rendah – habitat vital bukan hanya untuk harimau Sumatra tapi juga satwa liar lain yang terancam punah secara kritis.⁶ Walaupun harimau

Sumatra telah ditemukan sampai dengan ketinggian 3.200m,⁷ hutan dataran rendah lebih dapat mendukung kehidupan harimau.⁸ Pada tahun 2009, hutan seluas 10,5 juta ha tersisa sebagai habitat harimau Sumatra,⁹ walau sebagian besar dari wilayah ini adalah dataran tinggi.

Fragmentasi habitat semacam ini sangat buruk bagi harimau, yang memerlukan wilayah yang luas untuk bergerak dan berburu,¹⁰ serta meningkatkan konflik antara harimau dan manusia¹¹ dan menjadikan harimau lebih rentan terhadap perburuan liar.¹² Fragmentasi mengakibatkan fragmentasi lebih lanjut karena meningkatnya perumahan penduduk dan pembukaan jalan, menjadikan hutan lebih rentan terhadap perambahan dan penebangan.¹³

Antara 2009 dan 2011, 382.000ha habitat harimau telah ditebang habis, sebagian besar di antaranya adalah hutan dataran rendah.¹⁴ Provinsi Riau menyumbang lebih dari separuh dari kerusakan ini,¹⁵ dan kehilangan 10% dari habitat harimaunya dalam dua tahun.

▼ Seekor harimau Sumatra; hanya sekitar 400 ekor tersisa di alam liar. © Greenpeace / Tom Jefferson



**Kebun Binatang
Melbourne**

Australia
10 September 2013

Sektor perkebunan mendorong pembukaan habitat harimau Sumatra

Hampir duapertiga dari hilangnya habitat harimau Sumatra antara 2009 dan 2011 adalah wilayah yang diidentifikasi sebagai konsesi perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman industri.¹⁶ Satu juta hektar di luar itu – 10% dari hutan habitat harimau yang tersisa – tetap berisiko ditebang habis dalam wilayah konsesi ini sejak 2011. Banyak dari habitat ini terdiri dari daerah-daerah berhutan yang kecil dan terpisah yang penting bagi harimau sebagai penghubung antara bentang wilayah yang lebih besar.¹⁷ Investigasi lapangan dan analisis citra satelit juga menunjukkan pembukaan hutan yang signifikan secara ilegal di habitat harimau untuk kebun kelapa sawit di luar konsesi.¹⁸

Kelapa sawit sendiri bertanggung jawab atas hilangnya 15% habitat harimau. Sebagian besar hutan yang ditebang untuk konsesi kelapa sawit di Sumatra dalam kurun 2009–2011 merupakan habitat harimau.¹⁹ Selama lebih dari dua tahun, sektor ini telah membuka hutan habitat harimau yang tersisa dalam konsesi mereka.²⁰ Hampir tigaperempat habitat harimau yang dibuka tersebut berada dalam konsesi kelapa sawit di Riau.²¹

Wilayah deforestasi terbesar dalam habitat harimau teridentifikasi berada dalam konsesi yang dipegang oleh kelompok perusahaan kelapa sawit Surya Dumai, Duta Palma, Incasi Raya Group dan Danitama Makmur.

Dua dari perusahaan ini – Surya Dumai dan Duta Palma – adalah anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).²²

Sementara hampir duapertiga²³ dari hutan habitat harimau tersisa di Sumatra pada tahun 2011 dilindungi, dimana sebagian kecil di antaranya adalah hutan dataran rendah yang merupakan habitat utama harimau.



◀ Seekor harimau kehilangan bagian bawah dari salah satu kakinya di Taman Nasional Tesso Nilo. ©WWF-Indonesia/Tiger Research Team

Taman Nasional Tesso Nilo

▼ Petak-petak hutan habitat harimau yang tersisa di sebagian besar wilayah Taman Nasional Tesso Nilo. Saat ini, kurang dari seperempat dari kawasan ini masih berhutan, dengan perkebunan kelapa sawit ilegal menempati sebagian besar lahan yang telah terdeforestasi. ©Jufri/Greenpeace



Taman Nasional Tesso Nilo
0°11'52.80"S 101°50'30.00"E
4 Mei 2013



▼ Pengangkutan buah kelapa sawit dengan truk dari PT Inti Indosawit Subur, milik perkebunan kelapa sawit milik Asian Agri, divisi kelapa sawit dari grup RGE. Investigasi WWF baru-baru ini mendokumentasi perdagangan dari perkebunan kelapa sawit ilegal di dalam Taman Nasional Tesso Nilo ke pabrik PT Inti Indosawit Subur mill yang bersertifikat RSPO. ©Jufri/Greenpeace

Apakah RSPO?

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dibentuk pada tahun 2004 untuk mempromosikan penggunaan minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui standar-standar global yang kredibel dan melibatkan para pihak.²⁴ Asosiasi ini bersifat sukarela yang beranggotakan produsen, pengolah dan pedagang kelapa sawit, produsen barang konsumen dan organisasi lainnya. Sekitar 40% dari produsen minyak kelapa sawit global merupakan anggota RSPO;²⁵ sampai dengan akhir 2012, 15% dari minyak kelapa sawit telah tersertifikasi RSPO.²⁶

RSPO adalah organisasi terbesar dalam sektor kelapa sawit berkelanjutan, tapi standar-standar mereka tidak melarang deforestasi atau pembukaan lahan gambut untuk keperluan perkebunan.



PT Inti Indosawit Subur
Riau

Orangutan juga terkena risiko kerusakan hutan

Sementara perkebunan mengancam habitat harimau di Sumatra, situasi serupa juga terjadi pada orangutan di Sumatra dan Kalimantan. Semua orangutan terancam punah – dan orangutan Sumatra terancam punah secara kritis.²⁷ Kerusakan habitat paling akut terjadi di Kalimantan, dimana 141.000ha hutan habitat orangutan ditebang habis antara tahun 2009 dan 2011. Lebih dari sepertiga dari pembukaan hutan ini berada dalam wilayah izin konsesi perkebunan kelapa sawit.²⁸

Rencana aksi untuk orangutan dari Kementerian Kehutanan tahun 2007–2017²⁹ lebih tegas daripada rencana aksi untuk harimau Sumatra³⁰ dalam rekomendasinya akan tindakan yang diperlukan, termasuk ‘Melarang konversi habitat orangutan menjadi penggunaan lain’ dan ‘Mendorong penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan dalam habitat orangutan’.³¹

Walau demikian, tidak terdapat kemauan politis untuk menegakkan rencana aksi ini pada tingkat pemerintahan manapun yang terlibat dalam pengembangan penggunaan lahan atau rencana tata ruang atau dalam alokasi izin konsesi. Banyak habitat orangutan terletak dalam konsesi yang ada.



PT Mestika Prima Lestari Indah

4°10'57.60"N 97°49'44.40"E
30 September 2013

▲ OIC (Orangutan Information Centre) mengevakuasi induk dan anak Orangutan dari sepetak hutan yang telah ditebang untuk perkebunan kelapa sawit PT Mestika Prima Lestari Indah di kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Keduanya direkolasi dengan aman ke Ekosistem Leuser, tapi masih banyak orangutan yang berisiko akibat ekspansi kelapa sawit di kawasan kritis ini. ©Orangutan Information Centre

Fragmentasi hutan buruk bagi harimau

Harimau memerlukan wilayah hutan yang luas dengan minim gangguan, serta koridor satwa liar untuk menghubungkan populasi yang berbeda. Survei bentangan konservasi harimau baru-baru ini di seantero Sumatra menunjukkan bahwa habitat yang terfragmentasi untuk perkebunan atau pembangunan jalan, kecil kemungkinan ditemukan harimau.³²

Harimau juga kecil kemungkinannya di temukan di wilayah hutan yang baru dibuka. Di bentang alam harimau di Riau bagian utara terjadi laju deforestasi rata-rata hampir 10% per tahunnya dan okupansi harimau yang sangat rendah. Para pakar berpendapat bahwa 'mempertahankan keutuhan hutan adalah sangat penting bagi kelangsungan hidup harimau dalam jangka panjang ... menghentikan fragmentasi dan memperbesar kesempatan bagi penyebaran harimau di area-area hutan yang tersisa akan menjadi suatu pencapaian yang besar'.³³

Salah satu dampak paling serius dari meningkatnya fragmentasi habitat harimau adalah perburuan liar dan meningkatnya konflik manusia-harimau. Laju deforestasi yang pesat, pertumbuhan populasi penduduk dan pembangunan ekonomi di dalam dan sekitar habitat harimau Sumatra memaksa harimau meningkatkan kontakannya dengan manusia.³⁴ Harimau meninggalkan hutan yang makin sempit untuk mencari makanan, seringkali memangsa ternak,³⁵ atau melintasi wilayah yang berpenduduk untuk mencapai area hutan lainnya. Konflik diketahui terjadi dalam dan sekitar perkebunan kelapa sawit; contohnya, pada Februari 2013 seekor harimau di Jambi melukai dua pekerja perkebunan kelapa sawit PT Dasa Anugerah Sejati.³⁶

Konflik harimau-manusia adalah bahaya yang serius bagi harimau dan manusia. Antara tahun 1998 dan 2011, tercatat 638 konflik harimau-manusia yang terjadi di Sumatra,³⁷ dimana harimau menyebabkan kematian 72 orang dan melukai lebih dari 63 orang.³⁸ Kejadian konflik dan korban jiwa sangat banyak terjadi di Riau.³⁹ Konflik ini mengakibatkan kematian 59 ekor harimau⁴⁰ – kehilangan yang cukup besar mengingat bahwa hanya ada sekitar 400 ekor harimau Sumatra yang tersisa hidup di alam liar.⁴¹

Harimau juga sangat terancam oleh perburuan liar yang memasok bagian-bagian tubuh harimau ke pasar internasional.⁴² Jumlahnya sulit untuk ditentukan tapi sebuah studi tahun 2004 memperkirakan 253 ekor harimau dibunuh atau dijerat hidup-hidup antara tahun 1998 dan 2002.⁴³ Investigasi menemukan bagian tubuh harimau dijual bebas di kota-kota di Sumatra.⁴⁴ Kehilangan habitat dan fragmentasi meningkatkan kerentanan harimau terhadap perburuan liar karena meningkatnya akses manusia terhadap habitat harimau.⁴⁵

Aksi segera sangat diperlukan untuk menghentikan fragmentasi dan untuk menghubungkan kembali petak-petak habitat menjadi wilayah yang lebih besar dan mampu untuk mendukung pembiakan populasi harimau. Tanpa hal tersebut, keberlanjutan populasi harimau tidak dapat dipertahankan dikarenakan di sebagian besar wilayah habitat harimau saat ini mengalami pembangunan industrial.⁴⁶ Harimau dapat sama sekali hilang dari dataran rendah Sumatra. Sekalipun harimau mampu bertahan hidup di wilayah pegunungan namun tetap berisiko kecuali hubungan antar bentang-bentang alam dapat dipertahankan untuk mencegah populasi yang terisolasi menjadi pembiakan tertutup (*inbreeding*).⁴⁷



◀ Seorang petugas kehutanan memegang jerat baja temuannya yang biasa digunakan sebagai jebakan sederhana untuk menjerat satwa liar.
©Priananda/Greenpeace

Kerusakan hutan habitat harimau akibat sektor perkebunan melemahkan komitmen Indonesia di dunia internasional tentang konservasi dan iklim



◀ Perkebunan kayu pulp eucalyptus yang bersebelahan dengan hutan alam di sebelah timur Pekanbaru.
©Greenpeace/Beltra

Riau
31 Agustus 2008

Pada tahun 2010, Indonesia berkomitmen untuk menggandakan angka populasi harimau pada tahun 2022 sebagai bagian dari Deklarasi St. Petersburg, inisiatif bersama negara-negara yang memiliki habitat harimau.⁴⁸ Kesepakatan ini termasuk:

- memastikan semua pembangunan dalam bentang alam konservasi harimau 'kompatibel bagi harimau dan keanekaragaman hayati';
- melindungi atau merehabilitasi koridor antar bentang alam ini;
- mengarusutamakan konservasi keanekaragaman hayati ke dalam proses perencanaan dan pembangunan dalam habitat harimau.

Komitmen ini didukung oleh Rencana Nasional Pemulihan Harimau 2010, yang di dalamnya terdapat beberapa target spesifik, termasuk menciptakan dan menerapkan 'basis legal untuk melindungi habitat harimau di luar kawasan lindung'.⁴⁹

Pada tahun 2009, Presiden Yudhoyono berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020⁵⁰ dibandingkan dengan proyeksi 'business as usual', sebagian besar melalui usaha-usaha untuk mengatasi deforestasi dan degradasi lahan gambut.⁵¹ Pada tahun 2010, Indonesia menjalin

kerjasama REDD+ dengan Norwegia dengan penandatanganan Surat Niat (Letter of Intent) yang bervisi, diantara agenda reformasi penting lainnya, berupa penerapan moratorium izin konsesi baru dalam lahan berhutan selama dua tahun.⁵²

Pada bulan Mei 2011, Presiden Yudhoyono memberlakukan moratorium izin baru pada hutan primer dan lahan gambut.⁵³ Pada tahun 2013 moratorium ini diperbaharui untuk dua tahun ke depan.⁵⁴ Tidak dipungkiri moratorium ini merupakan langkah yang penting, tetapi pada praktiknya sebagian besar dari hutan primer yang tercakup telah dilindungi secara legal; dan sisanya sebagian besar tidak dapat diakses dan tidak berada dalam ancaman pembangunan secara langsung. Selanjutnya, 50% dari hutan primer yang tersisa dan lahan gambut di Indonesia tidak terlindungi karena berada dalam konsesi yang telah keluar; wilayah lain dari hutan dengan nilai karbon tinggi tidak termasuk dalam moratorium, karena diklasifikasikan sebagai hutan sekunder (bukan primer) oleh Kementerian Kehutanan.⁵⁵ Padahal hutan ini tidak hanya penting bagi iklim, namun juga kritis untuk kehidupan satwa liar.⁵⁶

Bukti pemetaan menunjukkan sejauh mana sektor perkebunan menganggap remeh komitmen Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan kehidupan satwa liar dan iklim dengan terus merusak hutan dan lahan gambut.

Prioritas pemerintah yang bertentangan

Komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan melindungi habitat kehidupan liar berdampak secara tidak serasi dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).⁵⁷ Rencana ini mencanangkan pembukaan ribuan hektar hutan di Sumatra, Kalimantan dan Papua atas nama ekspansi ekonomi untuk kelapa sawit, tambang dan sektor lainnya; tidak diperhitungkan perlunya merekonsiliasi strategi pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan hutan dan lahan gambut.

Jakarta

7 Juni 2013



Sebagai hasil dari prioritas yang bertentangan ini, para penyelenggara negara kesulitan untuk menerapkan undang-undang dan kebijakan yang relevan.

Kementerian Kehutanan bertanggung jawab untuk perlindungan hutan dan juga eksploitasi sektor kehutanan. Ini berarti ia memegang kedua peran dalam kaitannya dengan perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan dan kepatuhan mereka untuk melindungi dan memperluas habitat harimau. Di satu pihak Kementerian mengeluarkan komitmen untuk melindungi dan memperluas habitat harimau, contohnya melalui 'Strategi konservasi dan rencana aksi untuk harimau Sumatra' tahun 2007.⁵⁸ Di pihak lainnya, Kementerian Kehutanan adalah badan yang mengeluarkan izin untuk konsesi hutan melalui Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan. Selain memberikan konsesi tebang pilih dan konsesi HTI, Direktorat ini mengeluarkan banyak wilayah Hutan Produksi – wilayah yang dizonasi untuk eksploitasi sektor kehutanan – untuk ditebang habis dan dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit atau komoditas lainnya.

Ketika tujuan-tujuan ini bertentangan, Kementerian Kehutanan biasanya gagal dalam komitmennya untuk melindungi hutan dan lahan gambut, termasuk habitat kehidupan liar yang dilindungi, karena memberi prioritas pada konversi hutan untuk pembangunan industri.

Pada saat yang sama, Kementerian Pertanian adalah lembaga yang mengeluarkan izin konsesi dan izin lainnya untuk perkebunan komoditas pertanian seperti kelapa sawit – dan dalam prosesnya menghilangkan habitat harimau. Komitmen Kementerian Pertanian⁵⁹ untuk mengkaji semua konsesi kelapa sawit pada tahun 2014 memberikan kesempatan penting untuk

mengintegrasikan kebijakan lingkungan dan ekonomi pada tingkat nasional. Menggabungkan kedua visi kebijakan menjadi satu rencana penerapan yang efektif perlu memperhatikan pemikiran akan bentang alam yang lebih luas dan bukan semata-mata untuk tujuan pembangunan sesaat. Namun demikian, belum terlihat adanya konsistensi dari komitmen para menteri terhadap kebijakan tersebut.

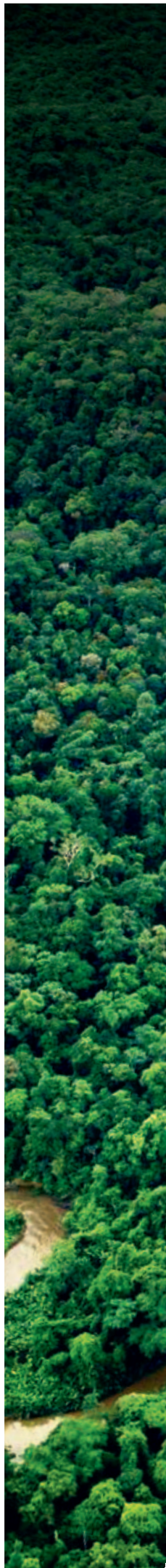
Para pejabat di provinsi makin memperburuk masalah ini. Mereka bertanggung jawab tidak hanya untuk mengeluarkan izin, tapi juga mengembangkan rencana tata ruang dan penggunaan lahan bagi daerah mereka. Tidak mengherankan, pertumbuhan industri ekonomi dikejar tanpa rencana pada tingkat bentang alam yang efektif untuk memastikan perlindungan hutan, lahan gambut dan habitat kehidupan liar. Salah satu kasus adalah kontroversi seputar rencana tata ruang wilayah provinsi Aceh.⁶⁰ Provinsi ini memiliki habitat penting bagi harimau dan orangutan Sumatra, namun pemerintah provinsi tidak bersedia membagi data dan rencana penggunaan lahan secara rinci, dan tampak lebih mengutamakan konversi hutan dan pembangunan jalan, yang akan makin memfragmentasi habitat harimau dan orangutan yang rentan.


Sebagai konsekuensinya, sekalipun Presiden Yudhoyono memiliki komitmen lingkungan yang kuat pada tingkat internasional – termasuk kesepakatan REDD yang bersejarah dengan Norwegia pada tahun 2010 – beliau tidak berhasil memastikan pemerintahannya mewujudkan hal tersebut.

Usaha-usaha konservasi di Indonesia menghadapi kendala korupsi yang meluas di semua tingkat pemerintahan. Penilaian risiko dalam sektor kehutanan Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2010 menemukan sejumlah masalah dari tingkat nasional sampai daerah, termasuk kapasitas dan integritas yang rendah dari badan pengelola hutan. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa pada 'semua kegiatan dalam zona hutan terdapat risiko korupsi yang sangat tinggi' dan 'Pejabat dan PNS dapat ... secara aktif menyalahgunakan posisi mereka dalam menentukan izin konsesi kehutanan'.⁶¹ Pada Juni 2013, gubernur Riau Rusli Zainal ditahan oleh KPK karena dugaan keterlibatannya dalam korupsi alokasi izin kehutanan, termasuk 'penyalahgunaan kewenangannya dalam menyetujui rencana kerja tahunan dari sejumlah perusahaan swasta'.⁶² Ia adalah pejabat pemerintah Riau keenam yang dituduh terlibat korupsi di bidang kehutanan oleh KPK – kelima orang lainnya saat ini telah dipenjarakan.⁶³

▲ Direktur Eksekutif Greenpeace Internasional Kumi Naidoo bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di atas kapal Greenpeace, Rainbow Warrior.
©Rante/Greenpeace

▶ Sebuah sungai yang membelah hutan Taman Nasional Tesso Nilo. ©Jufri/Greenpeace



An aerial photograph of a vast, dense green forest. A winding river with a light brown, muddy appearance flows through the center of the forest, creating several meanders. The forest canopy is thick and uniform in color, with some taller trees visible as dark spots. The overall scene is a lush, natural landscape.

‘Saya tidak mau nanti harus menjelaskan kepada cucu saya Almira bahwa kami, di masa kami, tidak dapat menyelamatkan hutan dan masyarakat yang bergantung padanya.’

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 27 September 2011

Taman Nasional Tesso Nilo

0°12'3"S 101°55'22.21"E
4 Mei 2013



PT Raja Garuda Mas Sejati

0°19'7"N 101°37'35"E

29 Juni 2013

Studi kasus

1. Hilangnya habitat harimau menjadikan Riau rentan kebakaran

Laju kehilangan hutan tercepat di Sumatra belakangan ini terjadi di Riau. Pada tahun 1985, tutupan hutan di Riau lebih dari tigaperempat wilayahnya, atau sekitar 7 juta ha.⁶⁴ Pada tahun 2011, lebih dari duapertiganya telah dibuka.⁶⁵

▼ Truk bermuatan TBS melintas menembus kabut asap di Kabupaten Rokan Hilir. ©lfansasti/Greenpeace



◀ Asap membubung dari lahan gambut yang membara di kawasan PT Raja Garuda Mas Sejati. ©lfansasti/Greenpeace

Target ekspansi perkebunan

Indonesia adalah produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia.⁶⁶ Riau adalah produsen terbesar di Indonesia, atau sekitar seperlima wilayah perkebunan kelapa sawit nasional⁶⁷ dan duaperlima ekspor pada tahun 2012.⁶⁸ Dumai adalah pusat perdagangan minyak kelapa sawit internasional; pedagang seperti Asian Agri, Musim Mas dan Cargill

beroperasi di pelabuhan utama kota ini dan Wilmar beroperasi di fasilitas pelabuhan mereka sendiri di Dumai-Pelintung.⁶⁹

Indonesia juga merupakan produsen terbesar pulp dan kertas, dimana dua produsen pulp terbesar dunia – Asia Pulp & Paper (APP) dan APRIL – berpusat di provinsi ini.

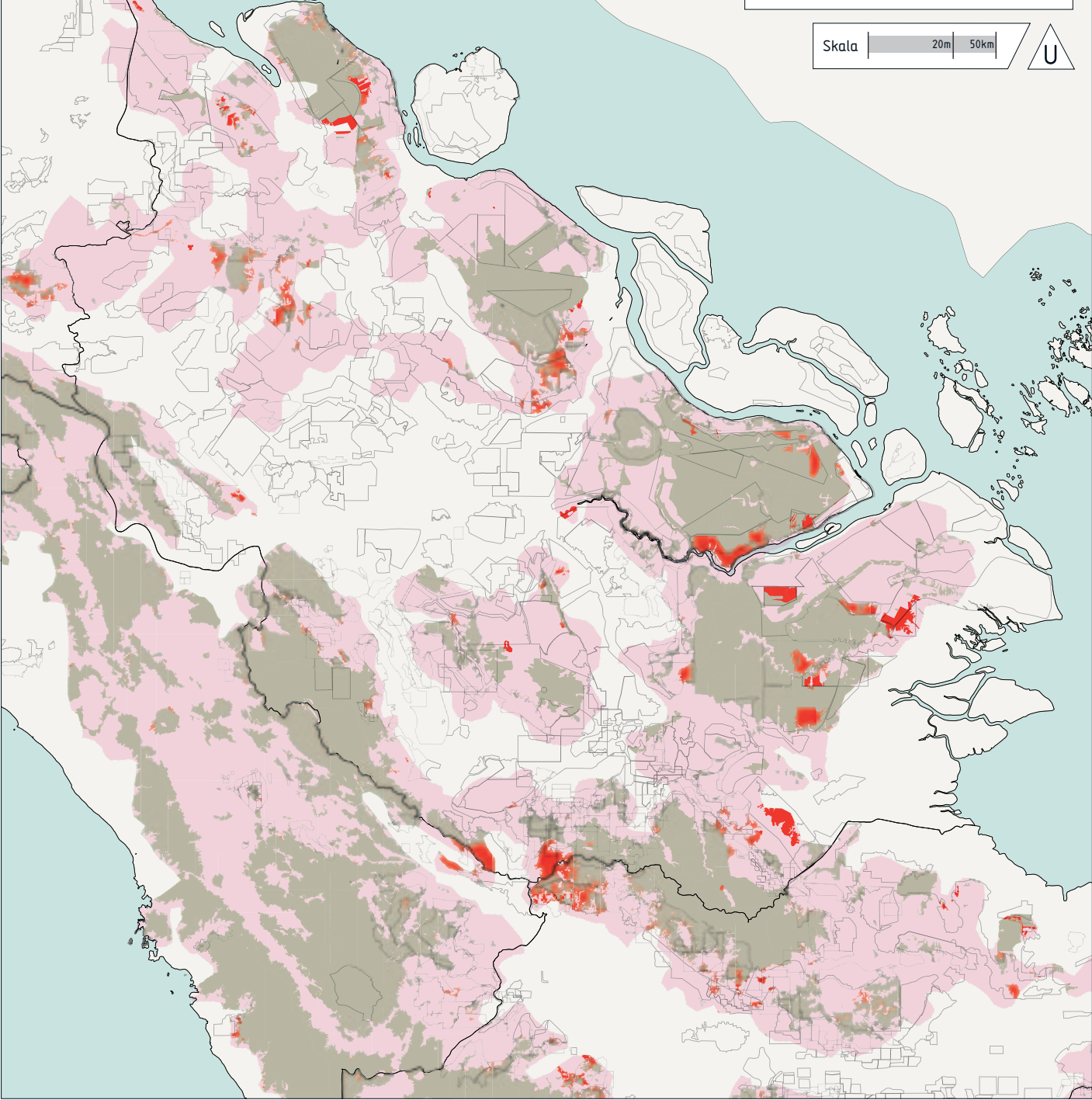
► Dumai adalah pelabuhan ekspor minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 40% dari volume perdagangan. ©Aslund/Greenpeace



Riau



Habitat harimau yang terancam di dalam konsesi-konsesi yang telah memiliki ijin



Mengancam harimau dan lahan gambut

Dominasi Riau dalam sektor perkebunan Indonesia dibayar dengan mengorbankan harimau, dengan cara menggusur wilayah hutan dataran rendah dan lahan gambut demi perkebunan. Provinsi ini, dengan sumberdaya hutan dataran rendah yang kritis, pada tahun 2009 memiliki sekitar seperlima dari hutan habitat harimau yang tersisa,⁷⁰ namun hanya kurang dari sepertiganya⁷¹ terlindungi. Pada kenyataannya, lebih dari separuhnya adalah hutan yang dapat dikonversi dan hutan produksi,⁷² atau zona yang tersedia untuk HTI dan perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar telah dialokasikan.

Dalam hanya dua tahun, antara 2009 dan 2011, 10% dari hutan habitat harimau di Riau telah rusak. Kerusakan habitat terbanyak terjadi di dalam konsesi kelapa sawit; hampir 90% dari semua hutan yang ditebang habis dalam konsesi kelapa sawit di Riau antara 2009 dan 2011 adalah habitat harimau.⁷³ Dari 150.000 ha habitat harimau dalam konsesi kelapa sawit pada tahun 2009, hampir 30% telah ditebang habis pada tahun 2011.⁷⁴

▼ Hutan Rawa Gambut Kerumutan yang membentang seluas 1,3 juta hektar adalah bentang alam yang telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas bentang alam regional untuk konservasi harimau. ©Greenpeace



Hutan Rawa Gambut Kerumutan

0°13'26"S 102°52'43"E
28 April 2010

Banyak deforestasi terjadi pada lahan gambut; pada tahun 2011, hanya sepertiga lahan gambut Riau seluas 4 juta ha masih berhutan.⁷⁵ Lahan gambut bukan hanya habitat penting bagi harimau, tapi juga salah satu simpanan karbon terkaya dunia. Riau diperkirakan memiliki 40% simpanan karbon dari lahan gambut Indonesia,⁷⁶ atau setara dengan emisi gas rumah kaca global selama satu tahun,⁷⁷ dengan kedalaman gambut sampai dengan 14 meter atau lebih di beberapa lokasi.⁷⁸

▼ Tonggak-tonggak pohon yang terbakar di hutan gambut habitat harimau yang baru saja ditebang habis. Saksi setempat mengatakan bahwa wilayah itu dibuka oleh perusahaan kelapa sawit PT Palma Satu (Duta Palma Group) yang letak konsesinya berdekatan. Wilayah ini termasuk dalam moratorium yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Duta Palma baru-baru ini dikeluarkan dari RSPO. ©Jufri/Greenpeace



Area yang berdekatan dengan PT Palma Satu

0°31'30.15"S 102°41'49.77"E
7 Mei 2013

Penyebab kebakaran, kabut asap dan emisi karbon

Pengeringan lahan gambut dalam perkebunan dilakukan untuk menyediakan kondisi yang cocok bagi kelapa sawit. Keadaan ini menyebabkan lepasnya emisi karbon yang cukup besar – melalui dekomposisi secara lambat atau secara pesat karena gambut yang kering menjadi rentan terhadap kebakaran yang disengaja atau tidak. 85% dari emisi gas rumahkaca Indonesia berasal dari kegiatan penggunaan lahan, sekitar separuhnya berkaitan dengan lahan gambut.⁷⁹

Kerusakan hutan Riau tidak hanya merugikan harimau; tapi juga bencana bagi iklim global. Lebih jelasnya, dampak kebakaran pada kesehatan dan keberlangsungan hidup masyarakat setempat sangat buruk.

Dampak sektor perkebunan pada iklim global sangat jelas. Kebakaran yang meluas di Riau pada bulan Juni 2013, yang mengakibatkan kabut asap yang meluas sampai ke Thailand, adalah pertanda paling dramatis dari emisi yang meningkat pesat dari perusakan lahan gambut Indonesia. Tapi mengatasi kebakaran gambut tidak menghentikan terus terjadinya emisi yang tak terlihat sebagai akibat pengeringan dan dekomposisi gambut akibat pengembangan perkebunan. Mengatasi kebakaran juga tidak akan mengembalikan hutan yang sehat bagi harimau sebagai hutan hak mereka.



Dumai
23 Juni 2013

▲ Seorang perempuan di Dumai menggunakan masker untuk melindungi dirinya dari polusi udara yang diakibatkan oleh kebakaran hutan yang hebat. ©lfansasti/Greenpeace

▼ Api melalap cabang pohon kering dalam lahan gambut yang baru saja ditebang habis di dalam konsesi kelapa sawit PT Rokan Adiraya Plantation. ©lfansasti/Greenpeace



PT Rokan Adiraya
1°9'57.46"N 100°51'13.14"E
24 Juni 2013

2. PT Rokan Adiraya

Latar belakang konsesi:

PT Rokan Adiraya (PT RAR) adalah konsesi kelapa sawit seluas 10.000ha di bagian utara Riau.

Analisis pemetaan dan investigasi lapangan:

Konsesi ini terletak persis dalam Bentang Alam Konservasi Harimau (*Tiger Conservation Landscape, TCL*) – wilayah ekosistem yang diidentifikasi memiliki kepentingan internasional yang merupakan habitat harimau bernilai tinggi.⁸⁰ Di dalam konsesi terdapat hutan lebat habitat harimau pada lahan gambut; sementara menanam pada lahan gambut dalam lebih dari 3 meter adalah ilegal, peta-peta yang ada mengindikasikan bahwa di beberapa tempat gambutnya mencapai kedalaman 4 meter.⁸¹ Lebih dari separuh dari hutan habitat harimau seluas 4.400ha yang tersisa dalam konsesi pada tahun 2009 telah ditebang habis pada tahun 2011.⁸²

Data FORMA yang tersedia pada Global Forest Watch menunjukkan bahwa pembukaan hutan skala besar dalam konsesi PT RAR terus berlanjut sampai Mei 2013.⁸³

Bulan Juni 2013, tercatat 151 hotspot kebakaran dalam konsesi.⁸⁴

Analisis satelit CIFOR⁸⁵ menunjukkan bekas kebakaran wilayah yang luas yang masih berhutan dalam konsesi PT RAR sejak tahun 2011; data FORMA menunjukkan bahwa hampir semua wilayah yang terbakar telah ditebang habis pada periode 2011-2013 dan analisis CIFOR mengaitkannya dengan pembangunan industri.

Investigasi lapangan Greenpeace pada bulan Juni 2013 mendokumentasi sebuah ekskavator tetap melanjutkan konstruksi kanal drainase pada lahan gambut dalam konsesi walau di sekitarnya terjadi kebakaran.

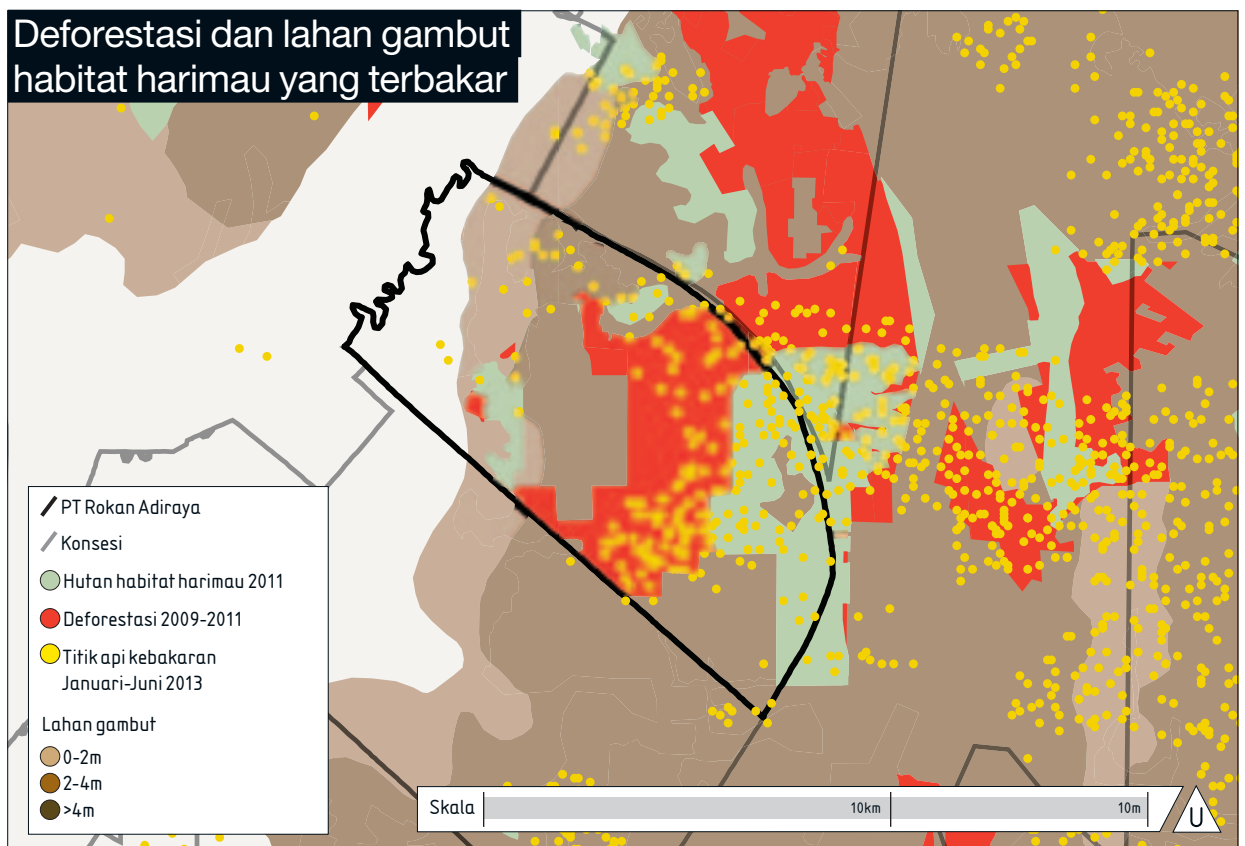
Perkebunan kelapa sawit dalam konsesi ini baru dimulai beberapa tahun belakangan ini. Greenpeace belum mengidentifikasi perdagangan dari konsesi ini ke pabrik-pabrik CPO (minyak kelapa sawit). Konsesi ini adalah indikasi masalah yang dihadapi sektor ini, termasuk untuk perusahaan-perusahaan seperti Wilmar yang sangat bergantung pada pasokan pihak ketiga.

Pada bulan Oktober 2013, Greenpeace menginformasikan perusahaan ini akan temuannya yang berkaitan dengan PT RAR.

Peta Rokan Adiraya



Deforestasi dan lahan gambut habitat harimau yang terbakar



3. PT Jatim Jaya Perkasa

Latar belakang konsesi:

PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP) adalah anggota RSPO.⁸⁶ PT JJP saat ini dimiliki oleh Ganda Group,⁸⁷ setelah dilaporkan dijual oleh Wilmar pada tahun 2005.⁸⁸ Hubungan kedua kelompok perusahaan ini cukup dekat.⁸⁹

Analisis pemetaan dan investigasi lapangan:

Peta batas konsesi yang diberikan ke RSPO oleh perusahaan⁹⁰ menunjukkan bahwa konsesi PT Jatim Jaya Perkasa mencapai sekitar 12.500ha. Seluruh wilayah konsesi ini pada awalnya merupakan habitat harimau walaupun tidak ada hutan yang tersisa pada tahun 2013; pada kenyataannya, konsesi ini hampir seluruhnya ditebangi pada saat dijual oleh Wilmar.⁹¹ Seluruh konsesi terpetakan sebagai lahan gambut, sebagian besar di antaranya gambut yang sangat dalam (lebih dari 4 meter).⁹² Menanam pada lahan gambut di atas 3 meter adalah ilegal.⁹³ Sekalipun tidak ada peta lahan gambut yang definitif, status perlindungan legal dari lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter diakui dalam pedoman Indonesia untuk mengklasifikasi wilayah bernilai konservasi tinggi (*high conservation value*, HCV).⁹⁴ Ini berarti pembangunan perkebunan pada wilayah ini melanggar standar-standar RSPO, yang mensyaratkan kepatuhan legal dan perlindungan wilayah-wilayah HCV.⁹⁵

Pada bulan Juni 2013, tercatat 75 hotspot kebakaran dalam wilayah konsesi yang sedang dibangun bersebelahan dengan wilayah perkebunan yang sudah ada.⁹⁶ Analisis Landsat sejak awal Agustus 2013 menunjukkan bahwa bekas kebakaran dalam konsesi mencapai hampir 1000ha, utamanya berada pada dua lokasi yang keduanya merupakan gambut sangat dalam.⁹⁷

Setelah mengikuti liputan mengenai kebakaran pada bulan Juni 2013, eksekutif RSPO mengambil langkah tak biasa dengan melancarkan komplain mereka sendiri terhadap PT JJP.⁹⁸

Informasi rahasia yang diperoleh Greenpeace mengindikasikan bahwa kelapa sawit dari perkebunan Ganda, termasuk PT JJP, diproses oleh Wilmar dan diperdagangkan ke pasar global.

Wilmar menyatakan pada bulan Juli: 'Sebagai respon dari kabut asap baru-baru ini ... kami akan memutuskan hubungan dengan pemasok manapun yang diketahui melanggar hukum mengenai pembakaran hutan. Ini adalah pembuktian upaya yang tegas dari kami untuk mempengaruhi industri.'⁹⁹

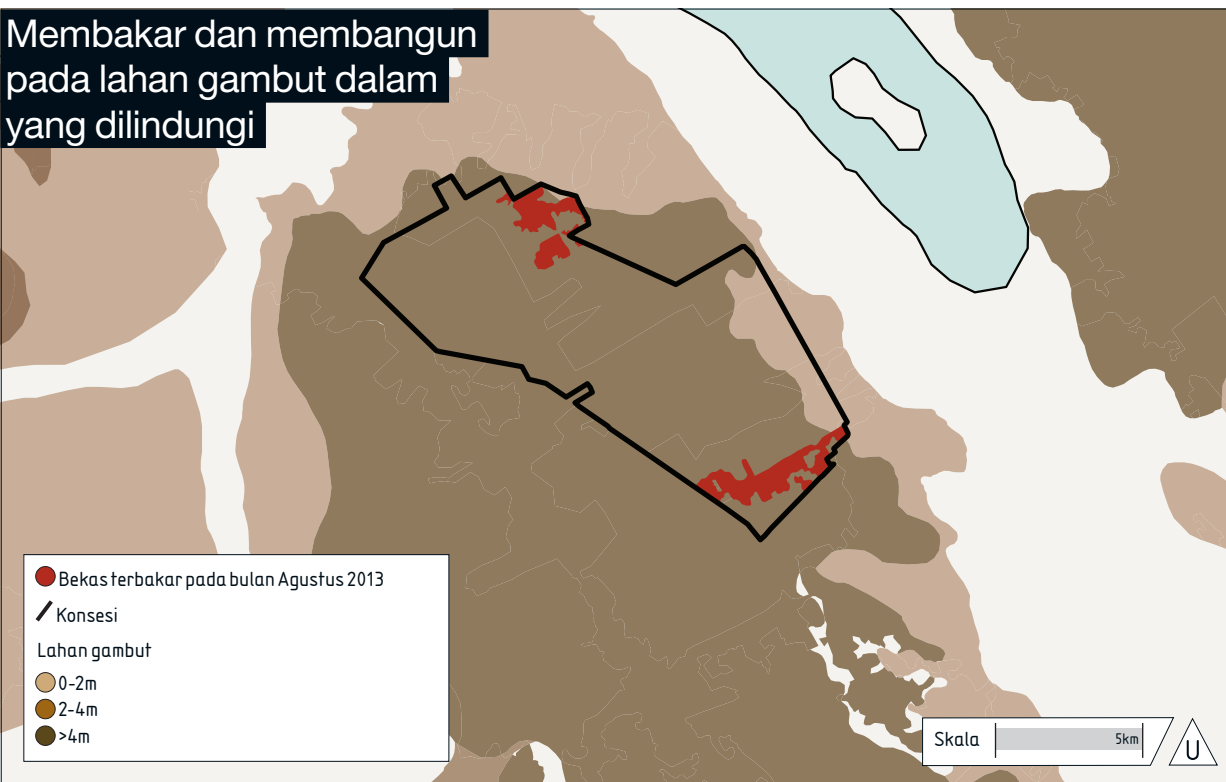
Pada bulan Oktober 2013, Greenpeace memberi informasi kepada Wilmar dan Ganda mengenai temuan-temuan yang berkaitan dengan PT JJP. Wilmar merespon dengan mengatakan bahwa



PT Jatim Jaya konsesi



Membakar dan membangun pada lahan gambut dalam yang dilindungi



- ▼ Pekerja PT Jatim Jaya Perkasa menggunakan alat berat untuk menyingkirkan kerusakan akibat kebakaran dalam konsesi.
©Tambunan/Greenpeace

PT Jatim Jaya Perkasa

1°55'55.41"N 100°49'33.19"E

17 September 2013



kasus tersebut ternyata merupakan ‘kelalaian’ dan kesalahan pengelolaan lahan gambut dan bukan merupakan pembakaran yang disengaja.¹⁰⁰ Jelas dari surat yang dilayangkan, perusahaan ini tidak atau hanya melakukan sedikit usaha untuk menjalankan investigasi mengenai penyebab kebakaran dalam konsesi pemasoknya. Perusahaan malah bergantung kepada pihak lain, seperti RSPO, untuk membuktikan tanggung jawab pemasok. Tidak disebutkan adanya kontrak yang dibatalkan. Surat tersebut juga tidak

mengomentari mengenai bukti bahwa sebagian besar konsesi berada pada gambut dalam dan dengan demikian secara hukum tidak diperbolehkan untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Investigasi Greenpeace menunjukkan bahwa Wilmar memprioritaskan perdagangan di atas rantai pasokan yang legal dan bertanggung jawab atas kegagalannya untuk meminta pertanggung jawaban terhadap dampak operasi yang lalai.

4. APRIL adalah pendorong deforestasi terbesar untuk pulp

▼ Tumpukan kayu alam yang berasal dari hutan lahan gambut di dalam konsesi kayu pulp PT RAPP di semenanjung Kampar.
©lfansasti/Greenpeace



Hampir separuh¹⁰¹ deforestasi habitat harimau Sumatra antara 2009-2011 berada dalam konsesi pulp. Grup Asia-Pacific Resources International Ltd (APRIL) dan konsesi afiliasinya¹⁰² bertanggung jawab atas seperenam dari hilangnya hutan habitat harimau periode tersebut.¹⁰³

Pesaing utama APRIL, Asia Pulp and Paper (APP), dan kelompok perkebunan asosiasinya Sinarmas Forestry, bertanggung jawab akan jumlah deforestasi serupa akan habitat harimau dalam periode 2009-2011.¹⁰⁴ Namun pada bulan Februari 2013 APP memberlakukan kebijakan konservasi hutan termasuk di dalamnya segera dihentikannya penebangan habis hutan hujan di seluruh rantai pasokannya di Indonesia;¹⁰⁵ indikasi awal menunjukkan bahwa perusahaan melakukan usaha serius untuk mematuhi komitmennya, dan jika usaha ini dipertahankan dampak dari kelompok ini akan menjadi minimal.

Di pihak lain, APRIL terus bergantung pada penggundulan hutan untuk memenuhi kebutuhan pabrik mereka. Data pemerintah terakhir mengungkapkan bahwa lebih dari separuh dari serat yang dipasok ke pabrik Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) milik APRIL adalah kayu hutan hujan.¹⁰⁶ Pada tahun 2012, APRIL berencana untuk membuka sekitar 60.000 hektar hutan hujan¹⁰⁷ – wilayah yang hampir seluas Singapura – untuk mendukung produksi pabrik tersebut.

Analisis citra satelit dari tiga konsesi yang berafiliasi dengan APRIL di Semenanjung Kampar, bagian dari Tiger Conservation Landscape/TCL prioritas di wilayah Kampar-Kerumutan yang lebih luas, menunjukkan bahwa deforestasi habitat harimau berlanjut pada tahun 2013. Ketiga konsesi ini, dua merupakan milik PT Riau Andalan Pulp and Paper dan yang ketiga milik PT Uniserya, membentang di

wilayah seluas 163.000ha. Lebih dari separuh wilayah ini masih berhutan pada tahun 2009; seluruh wilayah konsesi dipetakan sebagai habitat harimau dan lahan gambut, sebagian besar gambut dalam (>4m) Gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dilindungi dengan Keputusan Presiden.¹⁰⁸

Pada ketiga konsesi ini, wilayah seluas 39.000ha ditebang habis dalam periode antara tahun 2009-2013 – seperempat dari total wilayah mereka. Sebagian besar dari wilayah yang dibuka ini adalah hutan rawa sekunder, tapi juga termasuk di antaranya lebih dari 2.000ha hutan rawa primer dalam konsesi Uniserya.¹⁰⁹

APRIL adalah bagian dari kelompok Royal Golden Eagle (RGE), yang dikendalikan oleh taipan Sukanto Tanoto.¹¹⁰ Selain APRIL, sejak tahun 2006 Tanoto juga terlibat dalam deforestasi besar untuk pulp melalui Toba Pulp Lestari¹¹¹ dan untuk perkebunan kelapa sawit melalui Asian Agri.¹¹² Tanoto, melalui kerajaan bisnisnya, menyandang predikat yang diidentifikasi oleh Greenpeace sebagai pendorong deforestasi tunggal terbesar di dunia.

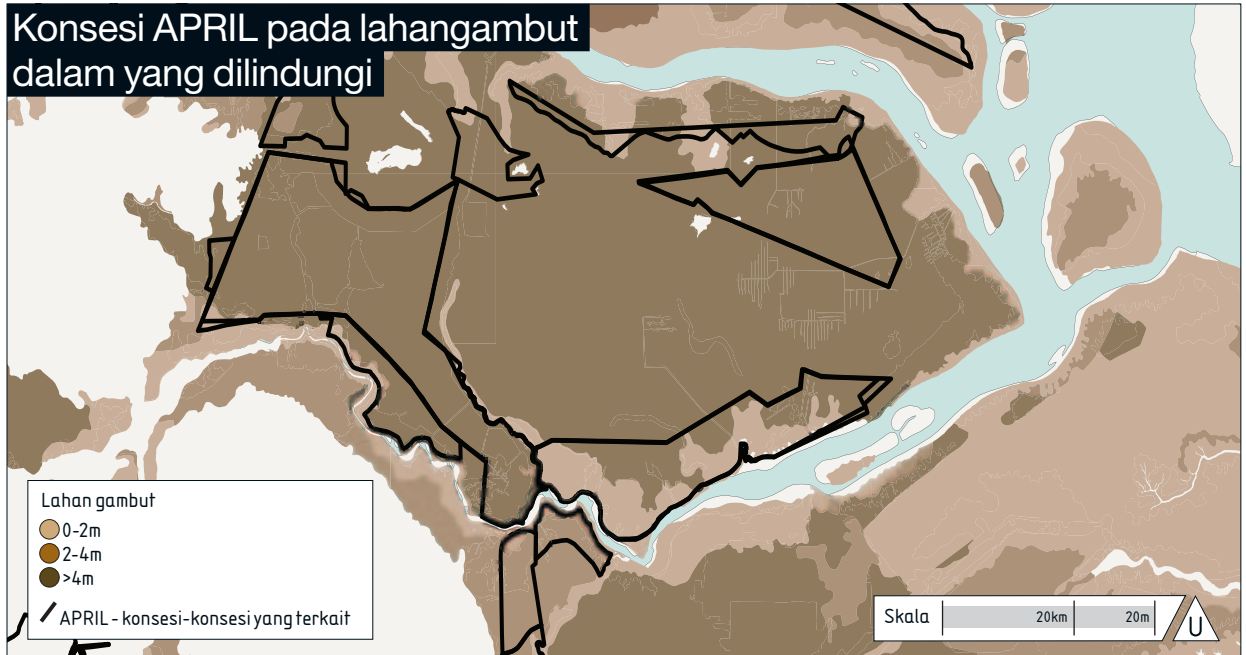
Di seluruh usahanya, Tanoto seharusnya mengikuti contoh perusahaan pulp dan kelapa sawit progresif dan memberlakukan kebijakan konservasi hutan yang memastikan operasi perusahaan tidak meninggalkan jejak deforestasi; ini harus dimulai segera dengan moratorium pada pembukaan hutan dan pengembangan lahan gambut lebih lanjut oleh perusahaan dan para pemasoknya.

Di sepanjang tahun 2013 Greenpeace telah memberi informasi kepada APRIL mengenai operasi mereka, baik secara langsung maupun melalui organisasi dimana mereka merupakan anggota, termasuk *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD).

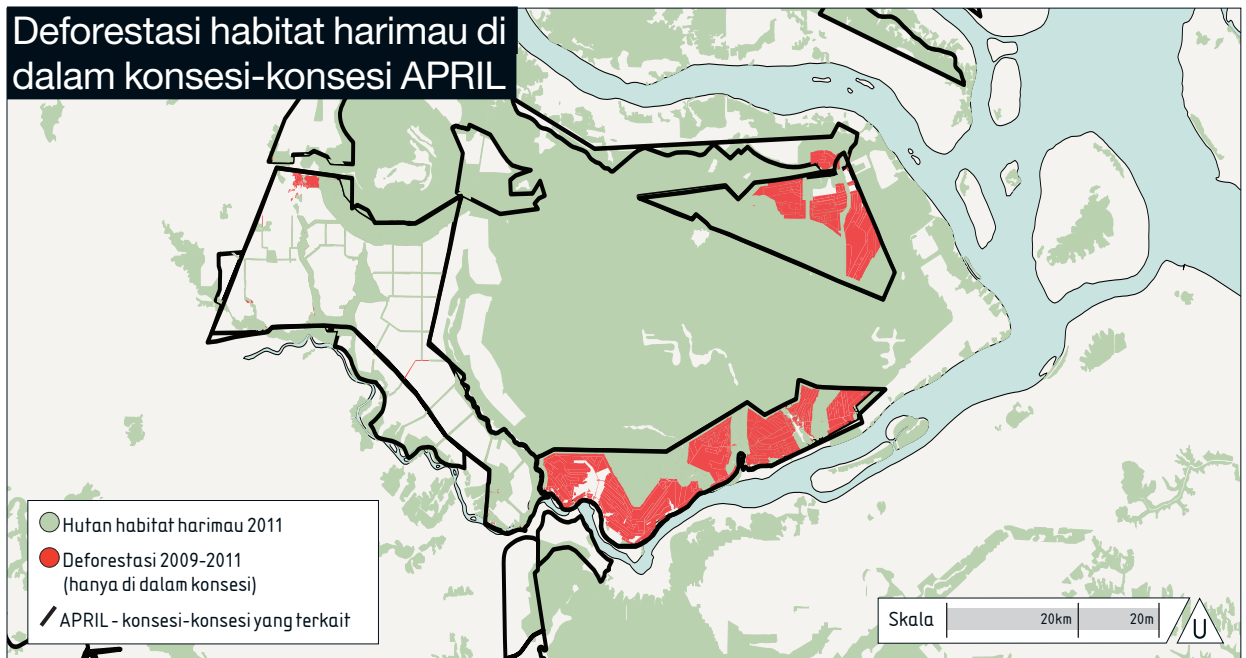
APRIL konsesi



Konsesi APRIL pada lahan gambut dalam yang dilindungi



Deforestasi habitat harimau di dalam konsesi-konsesi APRIL



► Pabrik pulp PT RAPP milik APRIL yang merupakan bagian dari divisi kayu pulp kelompok RGE. ©Beltra/ Greenpeace

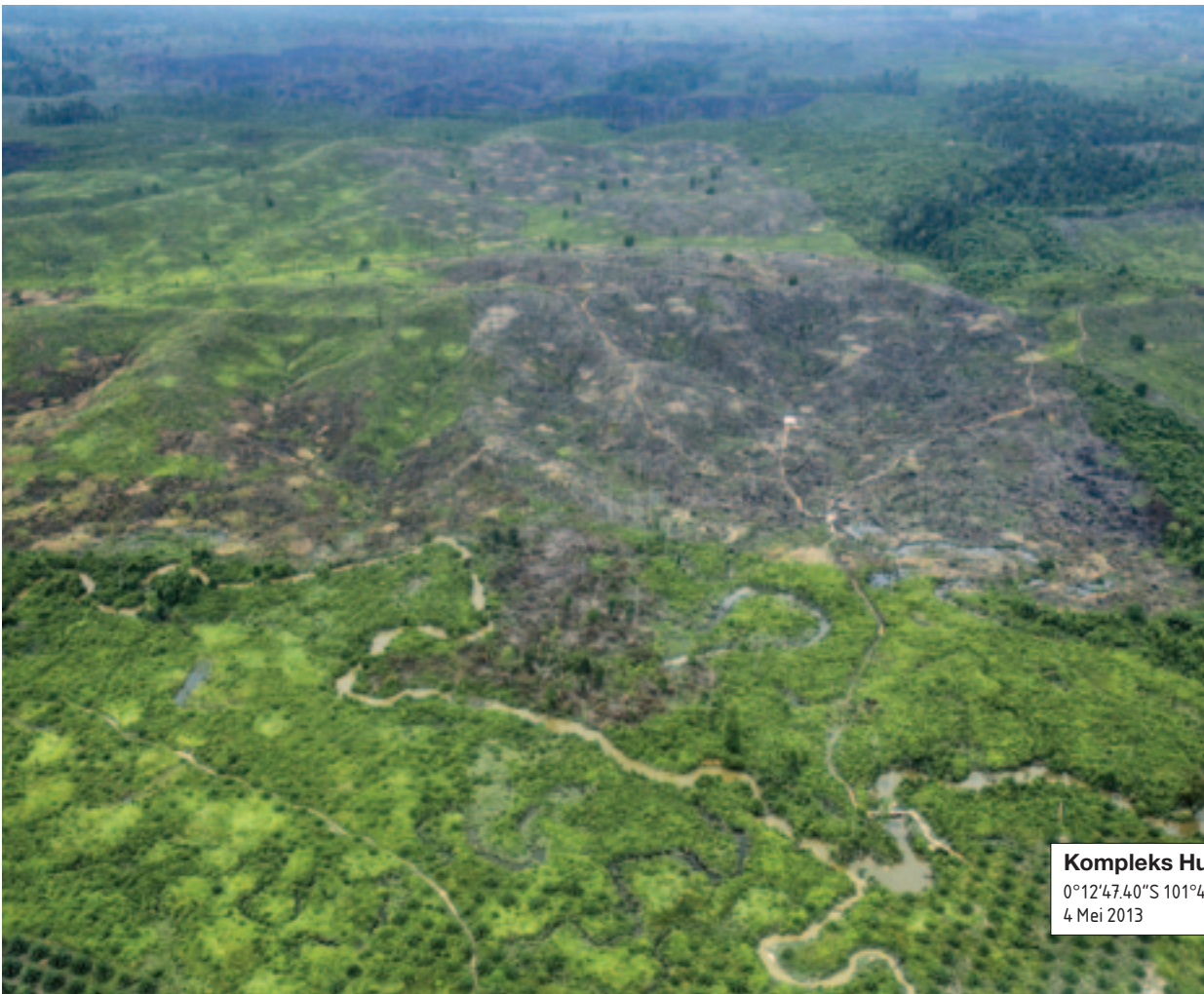
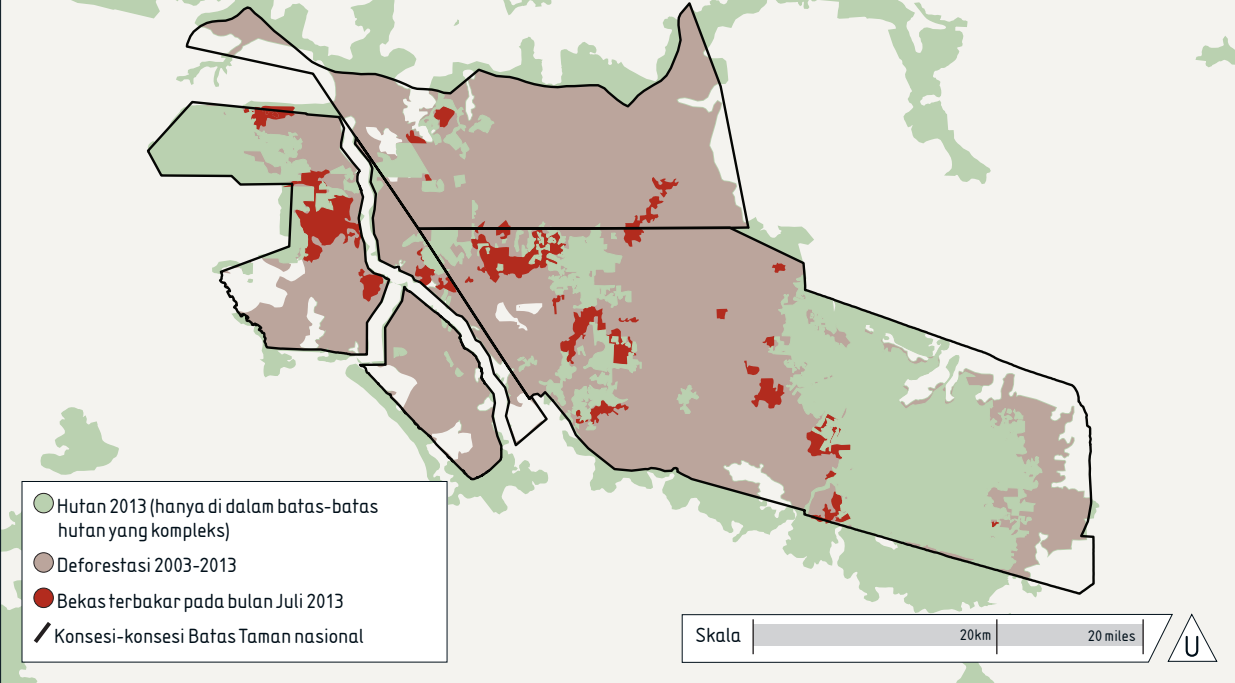


PT Riau Pulp & Paper
Riau
28 Agustus 2008

Tesso Nilo



Deforestasi pada Taman nasional dan bentang alam konservasi harimau yang penting



◀ Pengembangan perkebunan kelapa sawit skala kecil di kompleks hutan Tesso Nilo. Dengan pengecualian terbatas, kegiatan ini adalah ilegal.
©Jufri/Greenpeace

Kompleks Hutan Tesso Nilo
0°12'47.40"S 101°48'30.61"E
4 Mei 2013

5. Kompleks Hutan Tesso Nilo

► Investigator Greenpeace mengukur jejak harimau Sumatra dalam Taman Nasional Tesso Nilo. ©Rante/Greenpeace



Taman Nasional Tesso Nilo

0°10'58.20"S 101°58'9.01"E
1 Oktober 2013

Tiger Conservation Landscape(TCL)/ Lanskap Konservasi Harimau Tesso Nilo adalah TCL Prioritas Jangka Panjang¹¹³ yang termasuk wilayah sekitar 233.000ha.¹¹⁴ Di pusat TCL ini adalah kompleks hutan Tesso Nilo,¹¹⁵ yang terdiri dari Taman Nasional Tesso Nilo dan dua HPH, keseluruhannya berada dalam wilayah sekitar 170.000ha. Kementerian Kehutanan menetapkan Taman Nasional Tesso Nilo pada tahun 2004 dan mengekspansinya pada tahun 2009 karena nilai keanekaragaman hayatinya.¹¹⁶ Kompleks hutan ini¹¹⁷ tercatat memiliki salah satu keanekaragaman tumbuhan tertinggi di dunia¹¹⁸ dan mendukung populasi kunci dari gajah dan harimau Sumatra yang secara kritis terancam punah.

Hampir semua hutan alam di sekitar TCL Tesso Nilo telah menjadi HTI dan perkebunan kelapa sawit, dan TCL-nya sendiri dalam kondisi buruk.¹¹⁹ Sejak 2011, kompleks hutan ini telah kehilangan hampir separuh dari tutupan hutannya,¹²⁰ dalam bulan Juni 2013, hanya 39,000ha hutan alam yang tersisa – atau sekitar seperempat dari wilayah kompleks hutan.

Pada bulan Juni 2013, tercatat 446 hotspot dalam kompleks taman nasional, terutama di wilayah yang telah ditebang habis dalam periode 2011–2013. Analisis Landsat pada Agustus 2013 menunjukkan bahwa 7.600ha merupakan bekas kebakaran, berukuran mulai dari beberapa hektar hingga beberapa ratus hektar, sebagian besar bekas kebakaran terletak dalam taman nasional. Citra satelit menunjukkan pola bekas kebakaran pada lahan yang baru dibuka di sekitar petak-petak hutan tersisa yang makin menciut.¹²¹

Kehilangan hutan secepat ini akan mengakibatkan dampak sangat buruk bagi harimau dan kehidupan liar lainnya. Tesso Nilo diperkirakan memiliki kepadatan hunian 1,2 harimau per 100km² (10.000ha).¹²² Dua area hutan terbesar yang tersisa di kompleks hutan Tesso Nilo memiliki luas 23.000ha dan 5.000ha,¹²³ yang artinya sangat sempit untuk mendukung ruang hidup harimau.¹²⁴ Sejumlah kecil harimau mungkin hidup dalam jangka panjang tetapi tidak akan terjadi populasi

yang berkembang biak secara berkelanjutan:¹²⁵ mereka akan bergantung pada migrasi jarak jauh ke wilayah hutan habitat harimau lainnya untuk mempertahankan populasi. Koridor habitat yang memberikan kesempatan pada harimau untuk mencapai wilayah lain saat ini juga terancam. Perambahan oleh manusia di Tesso Nilo sangat mungkin akan disertai dengan perburuan liar harimau dan perburuan spesies makanan harimau seperti rusa dan babi hutan, yang makin memperburuk keberlangsungan hidup harimau di wilayah ini.

Menurut survei lapangan World Wildlife Fund (WWF) pada kawasan lebih dari 50.000ha wilayah rambahan di dalam kompleks hutan Tesso Nilo pada tahun 2011, 70% (~36.000ha) di antaranya telah dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.¹²⁶

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di dalam kompleks hutan Tesso Nilo adalah ilegal. Seluruh wilayah dalam kompleks dikategorikan sebagai 'Kawasan Hutan' secara hukum, yang melarang pengembangan untuk komoditas pertanian seperti perkebunan kelapa sawit. Transaksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang berasal dari kompleks hutan Tesso Nilo seharusnya dianggap ilegal, dengan pengecualian hutan adat. Walau demikian, investigasi WWF menemukan bahwa ukuran rata-rata perkebunan per individu adalah 50 hektar,¹²⁷ jauh di atas ukuran biasanya untuk perkebunan kecil,¹²⁸ artinya terdapat kesediaan modal yang cukup besar. Survei lapangan menemukan lebih dari 95% perambah yang bermukim di dalam taman nasional berasal dari luar kawasan, yang sebagian besar dari luar Riau,¹²⁹ yang artinya hak adat tidak berlaku.

Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto, berkunjung ke Tesso Nilo pada bulan September 2013 dan menyaksikan kerusakan. Dalam wawancaranya dengan majalah Tempo, ia berkomentar, 'Saya kira akar masalahnya adalah ketidakmampuan kita menjaga kawasan supaya tidak dirambah, ketidakmampuan kita untuk menahan perambah [...] Bagaimana mungkin

sebuah taman nasional dijaga hanya oleh beberapa orang yang tanpa perlengkapan? Mobil operasional Balai Taman Nasional Tesso Nilo itu cuma satu. Kantor seksinya hanya ada dua. Itu pun tidak ada orangnya. Ada ketidaksihinggaan pemerintah menjaga kawasan itu.¹³⁰

Sejumlah pabrik minyak kelapa sawit mentah (CPO) beroperasi di sekitar kompleks hutan Tesso Nilo, banyak diantaranya menerima TBS dari pihak ketiga selain memproses TBS mereka sendiri. Beberapa pabrik tidak memiliki perkebunan mereka sendiri dan sama sekali bergantung pada TBS dari perkebunan independen.

Investigasi WWF tahun 2011–2012¹³¹ mengungkapkan bagaimana dua pedagang minyak kelapa sawit internasional – Asian Agri and Wilmar – terlibat dalam perdagangan kelapa sawit dari perusahaan ilegal kompleks taman nasional Tesso Nilo. Beberapa pabrik dari perusahaan ini, termasuk pabrik Asian Agri yang disertifikasi RSPO pada tahun 2011,¹³² membeli TBS yang ditanam secara ilegal dalam kompleks hutan.¹³³ Selanjutnya, beberapa kelompok produsen didanai anggota RSPO Asian Agri atau didukung Wilmar yang juga merupakan anggota RSPO.¹³⁴

CPO dari pabrik-pabrik ini dijual melalui Pelabuhan Dumai,¹³⁵ pusat ekspor minyak kelapa sawit Riau, dan dari sana dikirim ke 130 negara di seluruh dunia, termasuk Belanda, Cina dan India yang merupakan importer terbesar.¹³⁶

Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ mengatakan bahwa Indonesia ‘tidak usah menutup mata bahwa ada perusahaan kelapa sawit, seperti Wilmar, yang membuka pintu pabriknya untuk sawit-sawit yang diambil dari dalam Taman Nasional Tesso Nilo ... Mengapa perusahaan sebesar Wilmar mau menerima tandan sawit yang tidak jelas asalnya?’¹³⁷

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menjawab temuan WWF dengan menekankan peraturan yang mengatakan bahwa pabrik minyak kelapa sawit harus ‘mencatat asal dari pihak ketiga yang memasok Tandan Buah Segar... [Prinsip dan Kriteria RSPO revisi 2013] memungkinkan kendali transparan yang menyeluruh dan lengkap sejak dari lapangan sampai pabrik.’¹³⁸

RSPO mengatakan bahwa Asian Agri dan Wilmar bekerjasama dan akan menghentikan pembelian tandan kelapa dari lahan yang ditebangi secara ilegal. Dengan asumsi para perusahaan akan terus bekerjasama, kata RSPO, tidak ada keluhan resmi yang dilayangkan kepada perusahaan tersebut saat ini.¹³⁹

Pada bulan Juli 2013, Wilmar menginformasikan kepada Greenpeace bahwa mereka ‘berkomitmen untuk tidak membeli tandan buah segar (TBS) yang diperoleh dari wilayah rambahan hutan dengan status lahan tidak jelas; dan sebagai tindak lanjut dari komitmen ini, kami telah menghentikan pembelian kelapa sawit dari kompleks Tesso Nilo dan wilayah sekitarnya.’¹⁴⁰

Namun, antara bulan September-Oktober 2013 Greenpeace mendokumentasikan berlanjutnya perdagangan TBS dari dalam taman nasional.

Pada bulan Oktober 2013, Greenpeace menginformasikan Wilmar mengenai temuan-temuan ini. Perusahaan merespon dengan menyatakan bahwa mereka ‘tidak bisa secara tegas menjamin bahwa tidak ada kemungkinan tercampurnya bahan baku kelapa sawit atau terkontaminasi dari sumber-sumber kontroversial dari para pemasok kami’¹⁴¹ dan mengakui bahwa mereka berusaha menerapkan sebuah sistem pelacakan penuh melalui pengurangan volume pasokan yang diterima melalui agen. Walau demikian, data yang mereka berikan mengindikasikan bahwa sepertiga dari TBS yang diterima oleh tiga pabriknya di kawasan kompleks hutan Tesso Nilo terus dipasok oleh para agen pada tahun 2013. Selanjutnya, perusahaan mengakui bahwa mereka dipasok oleh sejumlah pabrik non-Wilmar dalam kawasan taman nasional. Tidak jelas apabila Wilmar mengetahui siapa pemasok pabrik-pabrik ini atau apakah perusahaan telah memberitahu pabrik-pabrik ini akan kebijakan mereka mengenai sumber-sumber TBS kontroversial atau ilegal.

Investigasi Greenpeace dan respon perusahaan menunjukkan bahwa sistem dan pengawasan manajemen Wilmar yang ada terhadap rantai pasokan TBS mereka – baik pasokan ke pabrik-pabrik mereka sendiri dan ke pabrik pihak ketiga yang merupakan mayoritas pasokan CPO mereka-tetap tidak cukup.



◀ Investigasi Greenpeace mendokumentasikan TBS yang dimuat ke sebuah truk di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo sebelum dibawa untuk diolah. ©Greenpeace

Taman Nasional Tesso Nilo
0°15'02.4"S 101°47'52.9"E
27 September 2013



Riau
15 Mei 2012

Pemasok independen – asal usul yang tidak jelas

Petani kecil menguasai 40% dari wilayah perkebunan kelapa sawit di Indonesia,¹⁴² dan terutama di Riau.¹⁴³ Mereka adalah pemasok penting bagi para pedagang internasional melalui perantara-perantara, pabrik minyak kelapa sawit independen dan pabrik-pabrik yang berhubungan dengan perkebunan industri besar. Sektor ini harus mengatasi tantangan dan memastikan pasokan independen berasal dari perkebunan legal dan dikelola secara bertanggung jawab.

Analisis CIFOR tentang kebakaran bulan Juni 2013 menunjukkan bahwa 80% kebakaran berasal dari perkebunan ukuran kecil dan sedang.¹⁴⁴ Perambahan perkebunan kelapa sawit ke dalam bentang alam konservasi harimau terus berlanjut, dan sangat membahayakan kesehatan hutan dalam jangka panjang. Dengan pengecualian yang sangat terbatas, perambahan adalah ilegal – walau demikian panen dari perkebunan ini berhasil masuk ke dalam perdagangan minyak kelapa sawit internasional.

▲ Panen kelapa sawit dari sebuah perkebunan kelapa sawit masyarakat.
©Novis/Greenpeace

6. Wilmar / PT Agrindo Indah Persada

▼ Pembukaan lahan dan pembangunan di Hutan HCV dan habitat harimau di dalam Konsesi kebun sawit PT. AIP milik Wilmar.
©Hilton/Greenpeace



PT Agrindo Indah Persada

01° 52' 4.34"S 102° 05' 5.36"E
20 Oktober 2013

Latar belakang konsesi:

PT Agrindo Indah Persada (PT AIP), anak perusahaan Wilmar, memegang izin konsesi seluas 1.280ha di kabupaten Merangin, Jambi. Penanaman 500ha dalam wilayah ini telah disetujui, menurut laporan RSPO 'Prosedur penanaman baru: Ringkasan laporan penilaian'.¹⁴⁵ Separuh dari konsesi dipetakan sebagai habitat harimau.¹⁴⁶

Temuan penilaian HCV:

Wilayah yang diklasifikasikan sebagai bernilai konservasi tinggi (HCV) adalah sekitar (417ha) dari total luas konsesi.¹⁴⁷ Ini termasuk wilayah dengan tingkat keanekaragaman hayati penting (HCV 1)¹⁴⁸ yang bertindak sebagai koridor

harimau Sumatra dan spesies terancam punah dan rentan lainnya, termasuk Ungko/Siamang (*agile gibbon*), macan dahan Sumatra dan beruang madu.¹⁴⁹

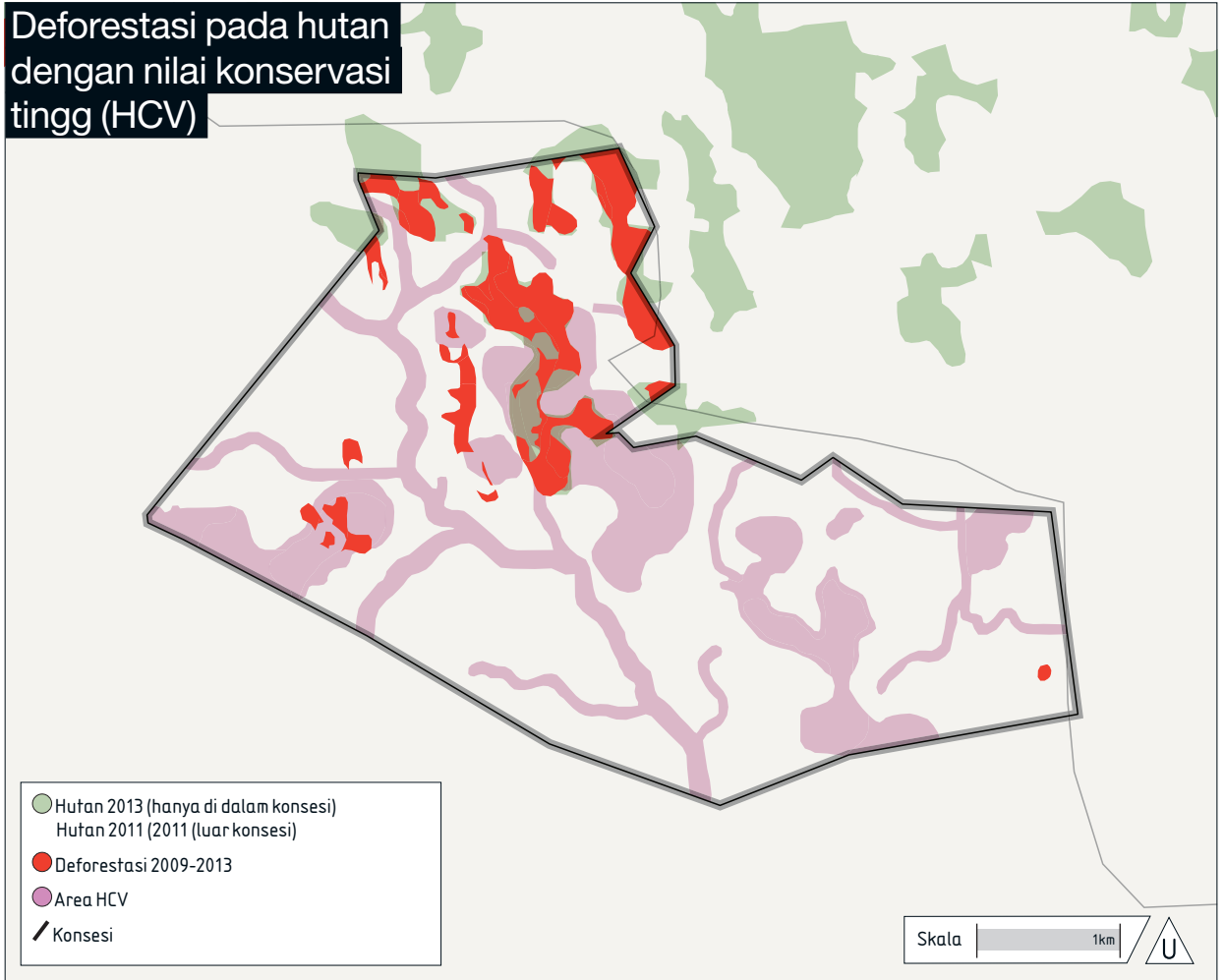
Penilaian ini juga mengidentifikasi wilayah yang memberikan jasa lingkungan penting (HCV 4),¹⁵⁰ termasuk lereng-lereng curam yang memerlukan perlindungan dari erosi dan daerah penyangga sekitar mata air, anak sungai dan sungai yang juga berfungsi sebagai pembatas kebakaran yang efektif.¹⁵¹

Penilaian ini mengidentifikasi wilayah-wilayah kritis untuk mempertahankan identitas budaya masyarakat lokal (HCV 6),¹⁵² terutama 46ha hutan adat Bukit Murau, yang dianggap keramat oleh Suku Anak Dalam.¹⁵³ Rencana pengelolaan PT AIP tahun 2009 juga

Jambi AIP



Deforestasi pada hutan dengan nilai konservasi tinggi (HCV)



memasukkan rencana menanam kembali hutan seluas 370ha di wilayah HCV,¹⁵⁴ namun investigasi lapangan menemukan pembukaan hutan besar-besaran.

Analisis pemetaan dan investigasi lapangan:

Hutan menutupi sekitar 10% (124ha) dari konsesi ini pada tahun 2009, yang hampir 40%-nya (48ha) sebelumnya adalah HCV. Pada tahun 2013, tersisa kurang dari 20ha wilayah berhutan. Sepertiga dari pembukaan ini (35ha) merupakan hutan HCV. Investigasi lapangan mendokumentasikan pembukaan jalan dan perkebunan pada wilayah-wilayah yang didokumentasikan sebagai lereng-lereng curam HCV. Erosi dan pohon tumbang sebagai

konsekuensi dari pembangunan jelas terlihat.

Hampir semua deforestasi dalam PT AIP pada periode 2009–2013 adalah habitat harimau. Seorang penduduk lokal mengaku pada Greenpeace bahwa ia bertemu dengan sekeluarga harimau (termasuk anaknya) keluar dari wilayah dekat konsesi PT AIP.

Pada bulan Oktober 2013, Greenpeace menginformasikan Wilmar akan temuan-temuan ini. Perusahaan merespon dengan mengatakan bahwa mereka memiliki prosedur ketat dalam pengembangan perkebunan dan pembukaan wilayah HCV adalah kesalahan para kontraktor. Investigasi Greenpeace menunjukkan bahwa sistem dan pengawasan manajemen Wilmar akan operasi mereka sendiri tidak cukup.

Ulasan mengenai Wilmar Group

Wilmar International Ltd, anggota RSPO yang berkantor pusat di Singapura menggambarkan diri mereka sendiri sebagai 'kelompok agribisnis terkemuka Asia', dengan lebih dari 400 pabrik manufaktur;¹⁵⁶ perusahaan ini beroperasi di lebih dari 20 negara di empat benua,¹⁵⁷ sementara jaringan distribusinya mencapai lebih dari 50 negara.¹⁵⁸ Selain mempunyai perkebunan yang luas dan usaha pengolahan di Indonesia dan Malaysia, perusahaan ini mengaku sebagai penyuling minyak kelapa sawit terbesar di kedua negara dan pengolah terbesar dunia dan produsen barang dengan minyak kelapa sawit dan *lauric*,¹⁵⁹ dengan kurang lebih 35% pangsa pasar global pengolahan minyak kelapa sawit.¹⁶⁰

Wilmar International Ltd secara efektif adalah aliansi antara perusahaan komoditas AS Archer Daniels Midland (ADM – penguasaan saham 16%) dan keluarga Kuok dari Malaysia (penguasaan saham 44%).¹⁶¹

Sejak akhir 2012, Wilmar International Ltd memiliki total perkebunan kelapa sawit seluas 256.000ha, hampir tiga perempatnya (190.000ha) berada di Indonesia.¹⁶² Namun demikian, sejak tahun 2007 Wilmar menguasai sekitar 500.000ha lahan perkebunan, dimana 230.000ha di antaranya telah ditanami – separuh dari lahan yang telah ditanami ini berada di Indonesia.¹⁶³ Ini berarti perusahaan menyimpan lahan hampir 250.000ha yang belum ditanami.

Kelompok ini secara pesat mengekspansi operasi perkebunannya di Afrika. Dalam laporan tahunan 2012 mereka melaporkan total wilayah yang telah ditanami di Uganda dan Afrika Barat masing-masing adalah sekitar 6.000ha dan 39.000ha, di luar lebih dari 140.000ha yang dikelola di bawah skema penanam lepasan.¹⁶⁴ Menurut laporan ini, pada tahun 2013 mereka bertujuan untuk memulai menanam kembali 30.000ha lahan yang baru diperoleh di Nigeria.¹⁶⁵

Wilmar juga merupakan pengolah penting buah kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit mentah. Pabrik-pabrik perusahaan memproduksi 3,5% pasokan global minyak kelapa sawit mentah pada tahun 2012.¹⁶⁶ Lebih dari 50% dari ini berasal dari petani kecil dan penanam pihak ketiga lainnya.¹⁶⁷

Walau demikian, lebih penting lagi perusahaan ini merupakan penyuling minyak kelapa sawit mentah dan pengolah hilir dari minyak suling menjadi lemak dan *oleochemical* yang digunakan dalam sektor-sektor makanan, biofuel, keperluan rumahtangga dan perawatan diri.¹⁶⁸ Di luar Indonesia dan Malaysia, mereka memiliki fasilitas penyulingan dan pengolahan di Cina,¹⁶⁹ India,¹⁷⁰ Eropa,¹⁷¹ AS¹⁷² dan tempat-tempat lain. Sebagian besar dari CPO yang disuling oleh Wilmar dipasok oleh pengolah lain, dan pada akhirnya hanya kurang dari 4% dari minyak kelapa sawit dan produk *lauric* yang diperdagangkan Wilmar berasal dari perkebunan mereka sendiri.¹⁷³

Pada tahun 2012, pasar utama kelompok ini dalam semua sektor bisnis adalah Cina (47%) dan Asia Tenggara (26%),

disusul oleh Eropa (8%), Australia dan Selandia Baru (4%), India (4%) dan Afrika (3%).¹⁷⁴ Wilmar adalah pemimpin pasar dalam minyak pangan kemasan di Cina dan juga memiliki pangsa pasar besar di India, Indonesia, Vietnam dan Bangladesh.¹⁷⁵

Produk-produk Wilmar – bukan hanya minyak suling dan bahan-bahan bakunya tapi juga barang konsumen (terutama di Asia, Timur Tengah dan Afrika¹⁷⁶) – dipasarkan ke seluruh dunia oleh jaringan anak perusahaan dan *joint ventures*. Ini termasuk *joint ventures* dengan Adani di India ('Adani Wilmar'),¹⁷⁷ raksasa komoditas agro AS, ADM (misalnya Olenex),¹⁷⁸ perusahaan kimia Swis, Clariant ('perusahaan amino global'),¹⁷⁹ perusahaan kimia AS, Huntsman,¹⁸⁰ perusahaan barang konsumen Inggris Raya, PZ Cussons ('PZ Wilmar')¹⁸¹ dan perusahaan kimia Afrika Selatan, Sasol ('Sasol Yihai')¹⁸².

Wilmar telah menjalin *joint venture* 50-50 dengan Kellogg's di Cina,¹⁸³ dimana Kellogg's mendapatkan untung dari jaringan distribusi Wilmar yang sangat luas untuk memasarkan merek-merek mereka termasuk sereal dan makanan ringan seperti Pringles.

Banyak perusahaan barang konsumen besar tidak memiliki kebijakan yang cukup untuk memastikan bahwa minyak kelapa sawit yang mereka beli tidak mendorong deforestasi. Greenpeace telah mengidentifikasi perdagangan produk-produk berbahan dasar minyak kelapa sawit dari Wilmar ke perusahaan-perusahaan termasuk Amway (AS)¹⁸⁴, Biskuit Arnott's (Aus)¹⁸⁵, Colgate Palmolive (AS),¹⁸⁶ Godrej (India)¹⁸⁷, Mondelez International¹⁸⁸ (dahulu bernama Kraft Foods Inc.; AS), Neste Oil (Finlandia)¹⁸⁹, Procter & Gamble (AS),¹⁹⁰ Reckitt Benckiser (Inggris)¹⁹¹ dan Twincraft Soap (AS).¹⁹²

Walaupun Wilmar telah menerapkan untuk tidak membuka hutan HCV¹⁹³ atau lahan gambut dengan kedalaman berapapun¹⁹⁴ dan menghindari penggunaan api dalam konsesi-konsesi mereka,¹⁹⁵ Greenpeace telah mendokumentasikan pembukaan habitat harimau yang diidentifikasi sebagai HCV di dalam salah satu konsesi milik Wilmar di Jambi. Kelompok ini, yang merupakan anggota RSPO, juga dilaporkan melanggar Prinsip dan Kriteria RSPO,¹⁹⁶ dan melanggar Kode Etik Perilaku (*Code of Conduct*) RSPO¹⁹⁷ sebagai hasil perpindahan tangan PT Asiatic Persada; dimana transfer ke Ganda Group, yang dekat dengan Wilmar,¹⁹⁸ dilakukan tanpa konsultasi sebelumnya dengan masyarakat yang terlibat dalam proses resolusi konflik.¹⁹⁹

Selanjutnya, Wilmar tidak mewajibkan kebijakan lingkungan dan sosial serupa untuk kegiatan-kegiatan dari para pemasok pihak ketiga yang menjual tandan buah segar kelapa sawit atau minyak kelapa sawit mentah. Dua pemasok – Ganda Group dan Surya Dumai (First Resources)²⁰⁰ – terlibat dengan kebakaran yang baru-baru ini terjadi di Riau.²⁰¹ Pemasok lainnya – Bumitama,²⁰² dimana Wilmar adalah investor penting di perusahaan ini²⁰³ – telah menebang habis habitat orangutan di dua wilayah yang berbeda di Kalimantan²⁰⁴ dan siap untuk membuka hutan dalam konsesi yang baru diperolehnya yang bersebelahan dengan Taman Nasional Tanjung Puting yang terkenal.²⁰⁵ Wilmar sebelumnya telah dikaitkan dengan perdagangan dari perkebunan ilegal dalam kompleks hutan Tesso Nilo²⁰⁶ dan mendukung produsen ilegal di sana.²⁰⁷ Perdagangan dari perkebunan ilegal dalam Taman Nasional Tesso Nilo ke pabrik-pabrik minyak kelapa sawit berlanjut terus.



PT Rokan Adiraya

1°9'57.42"N 100°51'13.14"E
24 Juni 2013

◀ Pohon-pohon kelapa sawit yang terbakar di Perkebunan PT Rokan Adiraya.
©lfansasti/Greenpeace

▶ Penyelamatan orangutan dari perkebunan kelapa sawit PT Ladang Sawit Mas. Orangutan ini mendapatkan infus. PT LSM adalah anak perusahaan dari Bumitama. Wilmar International adalah investor utama di Bumitama dan menerima lebih dari separuh penjualan minyak kelapa sawit mereka.
© Sabugo/IAR Indonesia



PT Ladang Sawit Mas Kaliman Barat

West Kalimantan
5 Maret 2013

Minyak kelapa sawit RSPO gagal melindungi para anggota Forum Barang Konsumen dari pengrusakan hutan

Forum Barang Konsumen atau *Consumer Goods Forum* (CGF) adalah jaringan industri global termasuk lebih dari 400 peritel, produsen manufaktur dan perusahaan-perusahaan lain. Pada tahun 2010, CGF mengeluarkan resolusi yang menjanjikan nol deforestasi pada tahun 2020 dalam rantai pasokan komoditas anggota-anggotanya, termasuk minyak kelapa sawit.²⁰⁸ Saat ini, CGF bergantung pada RSPO untuk memenuhi komitmen ini.

Greenpeace telah melayangkan surat kepada lebih dari 250 perusahaan konsumen minyak kelapa sawit – banyak di antaranya adalah anggota CGF – dan bertanya bagaimana mereka berniat untuk memastikan rantai pasokan mereka tidak terkait dengan deforestasi. Sebagian besar perusahaan responden bergantung pada sertifikasi RSPO untuk memenuhi komitmen keberlanjutan mereka. Sangat sedikit yang memiliki komitmen berbatas waktu untuk terlacaknya atau menghilangkan sama sekali deforestasi dari rantai pasokan mereka.

Standar RSPO gagal untuk melarang deforestasi dan konversi lahan gambut. Sebagaimana diungkapkan investigasi Greenpeace, anggota-anggota penting RSPO terlibat dengan perusakan habitat harimau, termasuk konversi lahan gambut, dan terimplikasi kebakaran besar pada bulan Juni 2013.

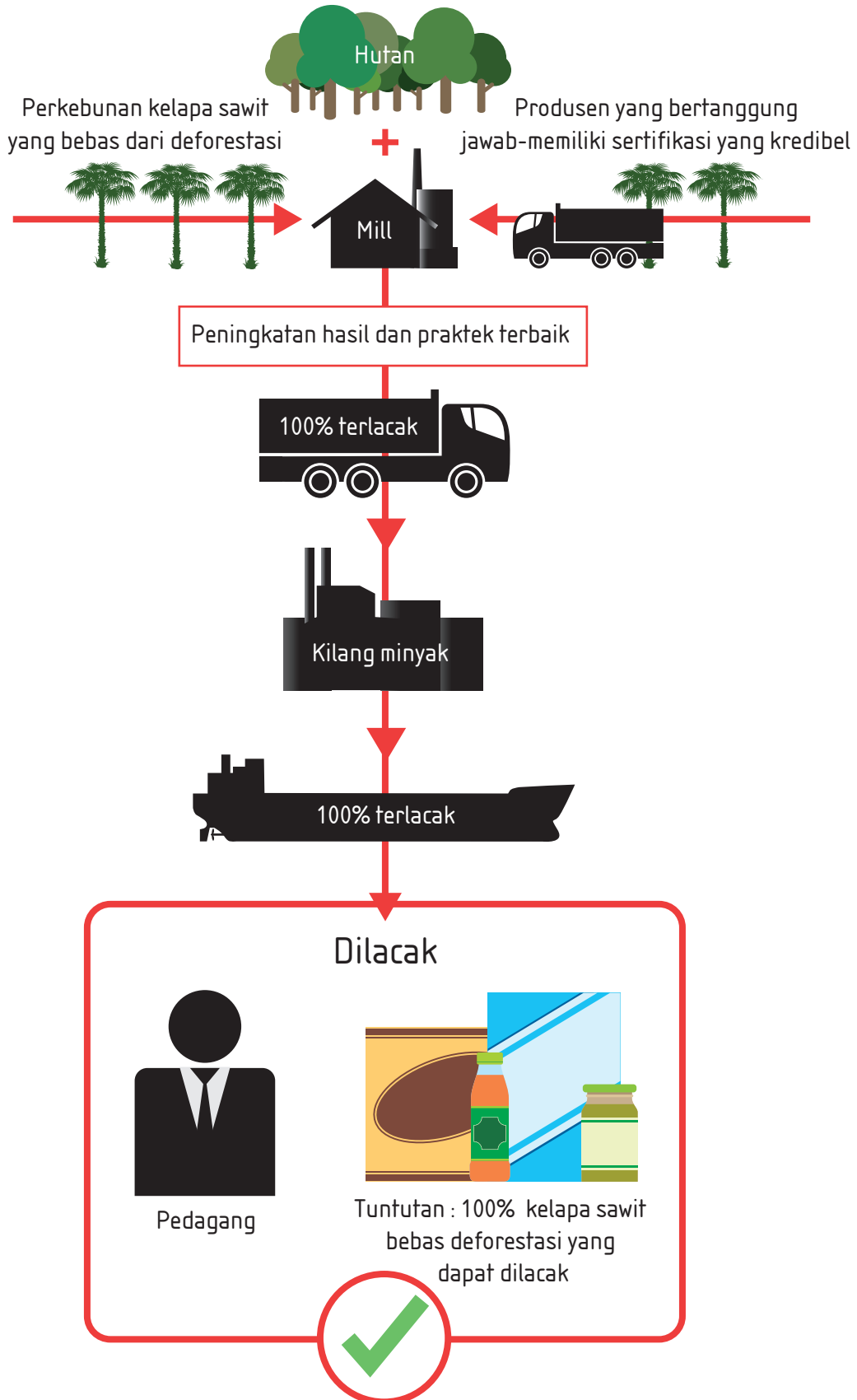
CGF, anggotanya dan pengguna minyak kelapa sawit besar lainnya harus melampaui standar RSPO yang ada untuk mencapai nol deforestasi dan menghilangkan risiko operasi mereka yang mendukung perusakan habitat harimau.

Wilmar adalah pemasok minyak kelapa sawit utama bagi banyak anggota CGF, termasuk Colgate Palmolive²⁰⁹, Mondelez International (dahulu Kraft Foods Inc),²¹⁰ Procter & Gamble²¹¹ dan Reckitt Benckiser.²¹² Kellogg's – anggota CGF dan pengguna minyak kelapa sawit – telah menjalin kerjasama *joint venture* 50-50 dengan perusahaan di Cina.²¹³



Solusi

Pasokan yang sepenuhnya dapat dilacak- produsen yang bebas dari deforestasi



Waktunya beraksi

Semua pemangku kepentingan dalam industri minyak kelapa sawit perlu beraksi sekarang untuk menghentikan industri tersebut merusak hutan hujan yang penting, membahayakan masa depan kehidupan liar yang terancam punah secara kritis, menggusur masyarakat lokal dan mendorong perubahan iklim. Laporan ini memberikan beberapa contoh praktik yang harus ditinggalkan oleh industri. Para pemangku kepentingan lain, dari pemerintah sampai pengguna, harus menunjukkan bahwa mereka tidak akan mentolerir perusakan semacam ini. Sebagai produsen terkemuka di dunia, Indonesia harus mengambil kesempatan memegang peran utama untuk mengubah sektor ini.

Greenpeace menyerukan kepada para pemangku kepentingan minyak kelapa sawit, pulp dan industri komoditas lainnya untuk mengambil langkah-langkah penting untuk menghentikan deforestasi dan memperbaiki tata kelola dan transparansi.

1. Sektor perkebunan: hentikan penghancuran hutan hujan Indonesia termasuk habitat harimau

- Segera terapkan moratorium pembangunan perkebunan dalam semua konsesi dimana terdapat andil perusahaan Anda sampai hutan dan lahan gambut diidentifikasi dan dilindungi melalui Kebijakan Konservasi Hutan.²¹⁴
- Dukung langkah-langkah tingkat bentang alam/lansekap untuk melindungi dan memperkuat situs-situs penting secara ekologis termasuk habitat harimau dan spesies terancam punah lainnya.

2. Pedagang perantara: jangan berdagang dengan produsen kotor, dukung perusahaan-perusahaan progresif dan produksi bertanggung jawab oleh petani kecil

- Tunda perdagangan dengan produsen yang terlibat dengan deforestasi atau pembukaan lahan gambut.
- Dukung produsen yang menerapkan kebijakan deforestasi nol yang jelas seperti yang diterapkan oleh para anggota Palm Oil Innovations Group (POIG).²¹⁵

3. Konsumen korporat: pastikan rantai pasokan anda ramah bagi harimau

- Buat komitmen untuk memastikan bahwa pasokan komoditas termasuk minyak kelapa sawit, kertas dan kemasan bebas deforestasi.
- Mulailah dengan memastikan keterlacakan penuh dalam rantai pasokan Anda dan dukung perusahaan yang memiliki komitmen jelas akan kebijakan deforestasi nol sebagaimana yang diterapkan oleh anggota POIG.

4. Sektor keuangan: jangan biayai deforestasi

- Tolaklah untuk memberi dukungan keuangan atau jasa kepada perusahaan minyak kelapa sawit dan komoditas lainnya yang terkait dengan deforestasi.

5. Pemerintah Indonesia: berikan kekuatan pada perlindungan harimau

Pastikan tata kelola yang kuat, prioritaskan perlindungan hutan dan harga industri yang memberi contoh.

- Tegakkan moratorium dan pastikan perkebunan kelapa sawit baru, pulp atau perkebunan lainnya dibangun pada lahan dengan simpanan karbon rendah.
- Berlakukan peraturan dan kebijakan tambahan untuk memastikan proteksi penuh untuk semua hutan dan lahan gambut, termasuk yang berada dalam wilayah konsesi.
- Tinjau izin konsesi yang ada. Tindak ilegalitas, termasuk kegagalan untuk memenuhi proses dalam pemberian izin, kegagalan untuk mematuhi peraturan lahan gambut atau pelarangan pembakaran. Cabut konsesi pelanggar yang keras kepala serta yang melanggar peraturan.
- Kembangkan dan terapkan rencana pemerintah untuk perlindungan dan rehabilitasi hutan dan bentang alam lahan gambut serta koridor kehidupan satwa liar.
- Ciptakan pencatatan nasional publik untuk semua jenis konsesi – termasuk kelapa sawit, pulp dan batubara – serta publikasikan One Map.²¹⁶ Kembangkan sistem pemantauan nasional independen untuk memberikan transparansi yang lebih besar pada proses ini, memastikan pemantauan dan penegakan serta memberikan kekuatan pada masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lain. Ini akan memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau dampak operasi, juga mengekspos dan menuntut pertanggungjawaban mereka yang melakukan kerusakan lingkungan seperti kebakaran, serta akan meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan memperkuat usaha penegakan hukum terhadap mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran.
- Kembangkan basis data lahan terdegradasi²¹⁷ untuk memungkinkan proses pertukaran lahan yang efektif dan memungkinkan konsesi legal di wilayah-wilayah hutan dan lahan gambut ditukar dengan konsesi di wilayah dengan stok karbon rendah yang tidak mempunyai masalah sosial, lingkungan atau ekonomi.
- Beri penghargaan terhadap kepemimpinan industri. Beri insentif pada produktivitas yang meningkat dalam perkebunan yang ada (misalnya melalui insentif pajak).

- 1 Analisis Greenpeace (yaitu Greenpeace Internasional kecuali disebutkan lainnya) didasari pada peta tutupan lahan tahun 2009 dan 2011, yang disediakan oleh Kementerian Kehutanan kepada Greenpeace Asia Tenggara pada tahun 2013. Data set tahun 2009 jelas mengandung kesalahan, misalnya terdapat wilayah hutan yang luas di wilayah Jawa Timur yang tidak terdapat dalam peta tutupan lahan yang tersedia di web server online Kementerian yang sama (<http://nfms.dephut.go.id/ArcGis/services>). Wilayah yang dimaksud adalah seluas 540.000ha dan telah dikeluarkan dari analisis untuk menghindari kelebihan perkiraan laju deforestasi. Kesalahan serupa ditemukan di Sulawesi Tengah, yang mengakibatkan dikeluarkannya 120.000ha dari analisis. Angka yang disajikan mengenai deforestasi hutan primer dan sekunder adalah sebagaimana diidentifikasi dalam peta-peta Kementan.
- 2 Analisis pemetaan Greenpeace. Analisis ini kemungkinan besar tidak lengkap – sebagian konsesi mungkin tidak teridentifikasi, artinya dampak sebenarnya sektor ini terhadap habitat harimau dapat lebih tinggi.
- 3 Linkie et al (2008)
- 4 Perkiraan populasi harimau dalam hutan rapat dan tidak dapat diakses sangatlah sulit. Angka 400 didasari pada Linkie et al (2008), mengutip Pemerintah Indonesia (2007). Kemungkinan angka harimau awalnya lebih tinggi dari ini, tapi menurunnya populasi akibat hilangnya habitat dan masalah lain yang disoroti dalam laporan ini sangat akut.
- 5 WWF Indonesia (2010): 5 menunjukkan 25,6 juta ha pada 1985 dan analisis pemetaan Greenpeace 12,4 juta pada 2011. Untuk keperluan laporan ini, Sumatra termasuk delapan provinsi daratan dan tidak menyertakan provinsi kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau karena tidak ada habitat harimau di sana.
- 6 WWF Indonesia (2010): 5
- 7 Wibisono & Pusparini (2010)
- 8 Pemerintah Indonesia (2007): 162
- 9 Analisis pemetaan Greenpeace
- 10 Sunarto et al (2012)
- 11 Pemerintah Indonesia (2007): 165
- 12 Shepherd & Magnus (2004): 22
- 13 Lihat misalnya Global Tiger Initiative (2012): 16-17
- 14 Analisis pemetaan Greenpeace
- 15 196.000ha (51%). Sumber: Analisis pemetaan Greenpeace.
- 16 233.000ha (61%): 15% (58.000ha) konsesi kelapa sawit, 46% (175.000ha) pulp dan kertas. Sumber: analisis pemetaan Greenpeace. Analisis ini belum sempurna dikarenakan tidak ada pencatatan terpusat untuk konsesi kelapa sawit. Tidak adanya transparansi menyulitkan untuk menetapkan batas konsesi yang pasti dan kepemilikan konsesi pada tingkat kelompok perusahaan: wilayah konsesi kelapa sawit kemungkinan besar diperkirakan terlalu kecil dan informasi beberapa konsesi mungkin sudah kadaluarsa. Ini berarti dampak sebenarnya dari sektor perkebunan terhadap habitat harimau mungkin lebih besar. Satu dari dua perusahaan besar pulp dan kertas, yaitu perusahaan yang berhubungan dengan Asia Pulp & Paper (APP) dan Sinar Mas Forestry, memberlakukan kebijakan konservasi hutan pada bulan Februari 2013 yang termasuk di dalamnya penghentian segera pembukaan hutan di seluruh rantai pasokan perusahaan di seluruh Indonesia, artinya ancaman dari sektor ini seharusnya sudah menurun sejak 2013 (lihat website APP, 'Sustainability'), watau kelompok pulp dan kertas besar satunya, APRIL, jelas merupakan ancaman utama.
- 17 Sunarto et al (2012)
- 18 WWF Indonesia (2013), Gaveau & Salim (2013a)
- 19 81% untuk Sumatra; 87% di Riau. Sumber: analisis pemetaan Greenpeace.
- 20 58.000ha dari 237.000ha. Sumber: Analisis pemetaan Greenpeace.
- 21 Analisis pemetaan Greenpeace
- 22 Duta Palma dikeluarkan dari RSPo pada tahun 2013. RSPo (2013e)
- 23 63%. Bagian terbesar dari habitat dalam kawasan hutan lindung adalah di Aceh (36%) dan Sumatra Barat (17%). Analisis pemetaan Greenpeace.
- 24 Website Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), 'Who is RSPO'
- 25 website RSPO, 'Why RSPO certification'
- 26 website RSPO, 'RSPO Worldwide Impact'
- 27 Ancrenaz et al (2008), Singleton et al (2008)
- 28 53.000ha. Sumber: Analisis pemetaan Greenpeace.
- 29 Kementerian Kehutanan (2009)
- 30 Kementerian Kehutanan (2007)
- 31 Kementerian Kehutanan (2009): 20
- 32 Wibisono et al (2011)
- 33 Wibisono et al (2011)
- 34 Pemerintah Indonesia (2007): 165
- 35 Forum Harimau Kita (2012): 11-12
- 36 Antara News Bengkulu (2013)
- 37 Forum Harimau Kita (2012): 6
- 38 Forum Harimau Kita (2012): 19
- 39 Forum Harimau Kita (2012): 7, 9
- 40 Forum Harimau Kita (2012): 17
- 41 Linkie et al (2008)
- 42 WWF Indonesia (2010) mengutip Kinnaird et al (2003); Linkie et al (2003); Uryu et al (2008); Linkie et al (2008)
- 43 Shepherd & Magnus (2004): 33, mengutip data dari Sumatran Tiger Conservation Program
- 44 Shepherd & Magnus (2004): Appendix 2
- 45 Shepherd & Magnus (2004): 22
- 46 WWF Indonesia (2010): 49, Linkie et al (2008)
- 47 Wibisono & Pusparini (2010), Linkie et al (2008)
- 48 Deklarasi St. Petersburg mengenai Konservasi Harimau (2010): 2
- 49 Kementerian Kehutanan / Global Tiger Initiative (2010): 8
- 50 Yudhoyono (2009)
- 51 Dewan Nasional Perubahan Iklim (2010a): 2
- 52 Pemerintah Kerajaan Norwegia dan Pemerintah Republik Indonesia (2010)
- 53 Rondonuwu (2011). Naskah Inpres No. 10/2011, dapat diakses di: <http://sipuu.sef.kab.go.id/PUUdoc/17176/Inpres0102011.htm>
- 54 Inpres No. 06/2013, dapat diakses di: <http://sipuu.sef.kab.go.id/PUUdoc/173769/Inpres0062013.htm>
- 55 Austin et al (2011)
- 56 Edwards et al (2012)
- 57 Pemerintah Indonesia (2008)
- 58 Kementerian Kehutanan (2007)
- 59 Jakarta Globe (2013)
- 60 Lang (2013)
- 61 Komisi Pemberantasan Korupsi (2010)
- 62 Jakarta Post (2013)
- 63 Eyes on the Forest (2013)
- 64 WWF Indonesia (2010): 4-5 dan Uryu & Budiman (2007): 3-8
- 65 Analisis pemetaan Greenpeace menunjukkan 2,2 juta ha hutan tersisa pada tahun 2011.
- 66 Yaitu 50% dari produksi global pada tahun 2012. Sumber: Mielke (2013).
- 67 Kementerian Pertanian (2013a)
- 68 Kementerian Pertanian (2013b)
- 69 PT Data Consult (2011)
- 70 1,9 juta ha dari 10,5 juta ha. Sumber: Analisis pemetaan Greenpeace.
- 71 537.000ha, atau 30,9%. Sumber: Analisis pemetaan Greenpeace.
- 72 730.000ha dalam hutan produksi dan 176.000ha dalam hutan konversi. Analisis pemetaan Greenpeace.
- 73 43.000ha dari 49.000ha. Sumber: analisis pemetaan Greenpeace.
- 74 43.000ha dari 151.000ha. Sumber: analisis pemetaan Greenpeace.
- 75 Analisis pemetaan Greenpeace menunjukkan 1,36 juta ha hutan lahan gambut pada tahun 2011. Wahyunto & Subagjo (2003): 34
- 76 14,6Gt karbon. Sumber: Wahyunto & Subagjo (2003): 34.
- 77 World Resources Institute CAIT 2.0, total emisi pada tahun 2010
- 78 Delft Hydraulics (2008): 18
- 79 Dewan Nasional Perubahan Iklim (2010b): 5
- 80 Global Tiger Initiative (2010): 1
- 81 Keppres no. 32/1990 dan Peraturan Pemerintah no. 26/2008
- 82 2.800ha. Sumber: Analisis pemetaan Greenpeace.
- 83 Website Global Forest Watch (GFW) dapat diakses di <http://www.gfw-beta.org>. Menurut website tersebut, 'Aksi Pemantauan Hutan (Forest Monitoring for Action, FORMA) adalah sistem untuk mengidentifikasi perubahan hutan hampir langsung (real-time) di seluruh wilayah tropis, yang dikembangkan oleh periset Dan Hammer, Robin Kraft, dan David Wheeler. FORMA menggunakan citra dari satelit MODIS Terra untuk menilai gangguan pada hutan melalui analisis time series dari kerapatan vegetasi (NDVI) dan faktor lain dengan resolusi 500m. Peringatan penebangan hutan FORMA dibuat tiap 16 hari, dan dikompilasi dalam platform GFW 2.0 sebagai peringatan bulanan. FORMA adalah proyek World Resources Institute dan dikembangkan di Center for Global Development.' Kredit: Dan Hammer, Robin Kraft, dan David Wheeler; World Resources Institute; Center for Global Development (2013).
- 84 Sizer et al (2013a)
- 85 Gaveau & Salim (2013b)
- 86 website RSPO, 'PT Jatim Jaya Perkasa'
- 87 website RSPO, 'PT Jatim Jaya Perkasa'
- 88 Siagian (2008) dan Wilmar (2013e)
- 89 Jakarta Globe (2012), Siagian (2008)
- 90 RSPo (2013a) dan peta di http://www.rspo.org/file/haze/PT-JatimJayaPerkasaGoogleEarth_forWeb.pdf
- 91 Analisis pemetaan Greenpeace
- 92 Analisis pemetaan Greenpeace
- 93 Keppres no. 32/1990 dan Peraturan Pemerintah no. 26/2008
- 94 Konsorsium untuk merevisi toolkit HCV untuk Indonesia (2008): 13, 45
- 95 RSPo (2013f). Prinsip 5.2 mensyaratkan penilaian HCV, yang perlu mendokumentasi 'adanya wilayah lindung'.
- 96 Analisis pemetaan Greenpeace selama sebulan penuh pada bulan Juni; RSPo (2013a) mencatat 74 selama sebagian bulan tersebut.
- 97 Analisis pemetaan Greenpeace
- 98 RSPo (2013b). Dari ke-22 keluhan yang terdaftar pada website RSPo sejak 20 September 2013 (http://www.rspo.org/en/status_of_complaint), hanya ini yang diluncurkan oleh pihak eksekutif.
- 99 Surat dari Wilmar ke Glenn Hurowitz. Sumber: Lapidus (2013).
- 100 Wilmar (2013e)
- 101 175.000ha. Sumber: Analisis pemetaan Greenpeace.
- 102 'Terafiliasi' mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut adalah bagian dari grup, termasuk anak perusahaan yang dimiliki sebagian.
- 103 63.000ha. Sumber: Analisis pemetaan Greenpeace.
- 104 76.000ha. Sumber: Analisis pemetaan Greenpeace.
- 105 website APP, 'Sustainability'
- 106 Kementerian Kehutanan (2012)
- 107 Informasi rahasia yang diperoleh Greenpeace
- 108 Keppres no. 32/1990 dan Peraturan Pemerintah no. 26/2008
- 109 Analisis pemetaan Greenpeace
- 110 website Sukanto Tanoto, 'Royal Golden Eagle'
- 111 Saferi (2012)
- 112 Analisis pemetaan Greenpeace berdasarkan peta tutupan lahan Kementerian Kehutanan tahun 2006, 2009 dan 2011
- 113 Wibisono & Pusparini (2010). TCL Kelas 3 adalah bentang alam berprioritas jangka panjang dengan 'populasi harimau dengan kemampuan bertahan yang dipertanyakan dalam jangka panjang' (sumber: website Panthera, 'Priority tiger conservation landscapes').
- 114 Dinerstein et al (2006)
- 115 WWF Indonesia (2013)
- 116 WWF Indonesia (2013): 4
- 117 Kompleks hutan Tesso Nilo terdiri dari Taman Nasional Tesso Nilo, HPH PT Hutani Sola Lestari dan PT Siak Timber Raya.
- 118 WWF Indonesia (2013): 4 mengutip Gillison (2001).
- 119 Dalam TCL secara keseluruhan, kurang dari 80.000ha dari hutan yang tersisa pada tahun 2011.
- 120 32.000ha. Sumber: Analisis pemetaan Greenpeace.
- 121 Analisis pemetaan Greenpeace
- 122 Sunarto et al (2013)
- 123 Analisis pemetaan Greenpeace
- 124 Griffith (1994)
- 125 Minimum 25 betina dalam usia biak, menurut Global Tiger Initiative (2012)
- 126 WWF Indonesia (2013): 3
- 127 WWF Indonesia (2013): 3
- 128 Rata-rata petani kebun kecil adalah 2ha menurut Kementerian Pertanian (2013a). Secara legal, petani kecil (smallholder) didefinisikan sebagai kebun dengan luas kurang dari 25ha. (sumber: Kementerian Pertanian (1996)).
- 129 WWF Indonesia (2013): 8
- 130 Tempo (2013): 68
- 131 WWF Indonesia (2013)
- 132 website RSPo, 'PT Inti Indosawit Subur Ukui'
- 133 Contohnya, WWF mendokumentasi tiga pabrik milik PT Citra Riau Sarana (Wilmar Group) dekat kompleks hutan Tesso Nilo menerima TBS yang ditanam secara ilegal di dalam kompleks hutan Tesso Nilo, termasuk di dalam taman nasional sendiri; dari sana CPO diperdagangkan ke fasilitas Nabati Indonesia milik Wilmar di Dumai. Sumber: WWF Indonesia (2013): 16-20. Pabrik-pabrik Wilmar Group ini terjadwal untuk disertifikasi RSPo pada tahun 2013 (sumber:

- RSPO (2013d):9-10) tapi tidak diketahui apakah hal ini telah dilakukan.
- 134 WWF Indonesia (2013): 10
- 135 WWF Indonesia (2013)
- 136 Pusdatin (2013)
- 137 Tempo (2013): 68
- 138 RSPO (2013c)
- 139 RSPO (2013c)
- 140 Wilmar (2013c)
- 141 Wilmar (2013e)
- 142 Kementerian Pertanian (2009)
- 143 Data dikompilasi oleh WWF Indonesia (2013): 6. Sumber data: Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2009 & Juni 2011, Dinas Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Rokan Hulu, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Bengkalis, Rokan Hilir, Kota Dumai, Siak, Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru 2011. Sebagaimana dicatat WWF Indonesia dalam catatan kaki 14, dari 1,56 juta hektar konsesi yang teridentifikasi oleh Dinas Kehutanan Riau (2006), Kementerian Kehutanan (2010) hanya 1,18 juta ha yang terpetakan sebagai Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Perkebunan (HGU dan IUP)— dalam artian memiliki semua izin usaha.
- 144 Gaveau & Salim (2013a)
- 145 PT Agrindo Indah Persada (AIP) (2009a): 8
- 146 Analisis pemetaan Greenpeace
- 147 PT AIP (2009a): 3 memberikan 370ha HCV namun analisis peta menunjukkan wilayah sebenarnya adalah 417ha.
- 148 Jennings et al (2003): 9
- 149 PT AIP (2009a): 4
- 150 Jennings et al (2003): 13
- 151 PT AIP (2009a): 4
- 152 Jennings et al (2003): 16
- 153 PT AIP (2009a): 4
- 154 PT AIP (2009a): 15
- 155 Wilmar (2013e)
- 156 website Wilmar, 'Corporate Profile'
- 157 Lubis (2013)
- 158 website Wilmar, 'Corporate Profile'
- 159 Yang terakhir didefinisikan sebagai terdiri dari biji palem dan minyak kelapa (karena kandungan asam laurat-nya yang tinggi). Sumber: website Wilmar, 'Merchandising & Processing, Palm & Laurics'
- 160 Ho (2012)
- 161 Wilmar (2013c)
- 162 Wilmar (2013b)
- 163 Wilmar (2008)
- 164 Wilmar (2013b). Catat bahwa angka ini lebih tinggi dari yang disarankan dari pernyataan di bagian lain dari laporan (diacu di atas) bahwa hanya 4% dari luas perkebunan Kelompok seluas 255.648ha berada di Afrika – kemungkinan sebagian dari perkebunan ini telah diperoleh atau ditanami sejak akhir 2012, tanggal yang diberikan untuk angka-angka persentase.
- 165 Wilmar (2013b)
- 166 Angka produksi CPO global tahun 2012 sebesar 53,7Mf (sumber: Oil World). Produksi CPO Wilmar pada tahun 2012: 1,9 juta ton (sumber: Wilmar (2013a)).
- 167 Wilmar (2013a)
- 168 Wilmar (2013b)
- 169 Termasuk Sasol Yihai (Lianyungang) Alcohol Industries Co Ltd, joint venture antara Wilmar International dan perusahaan Jerman Sasol Olefins and Surfactants (lihat http://www.sasol.com/sasol_internet/frontend/navigation.jsp?jsessionid=LWGVUDUFAHKCBG5N4EZSFEQ?articleTypeID=2&articleId=27800011&navid=600001&roofid=600001); Jiangxi Yichun Yuanda Chemical Co, secara tidak langsung dimiliki oleh Wilmar International (lihat http://en.yuanhuacn.com/content_detail/&FrontComContent_list01-001ContId=eb788d38-d5e7-4ab1-ab9f-19b90553645b&comContentId=eb788d38-d5e7-4ab1-ab9f-19b90553645b&comp_stats=comp-FrontComContent_list01-001.html); dan anggota kelompok perusahaan Yihai (termasuk Qinhuangdao Goldensea Industry dan Qinhuangdao Goldensea Specialty Oils and Fats Industries Co Ltd), joint venture antara Wilmar International dan ADM (lihat <http://www.golden-sea.cn/yihai/en/main.html>; http://www.golden-sea.cn/yihai/en/tz_13.html; http://www.golden-sea.cn/yihai/en/tz_5.html).
- 170 Termasuk Rajshri Packagers Ltd, Acalmar Oils and Fats Ltd dan Krishnapatnam Oils & Fats Pte Ltd (lihat <http://www.icra.in>), dan anak perusahaan dengan kepemilikan 50% Adani Wilmar Limited (lihat <http://www.dnaindia.com/print710.php?cid=1768311>).
- 171 Di Jerman (Wilmar Edible Oils GmbH – lihat Wilmar (2012a)), Belanda (Wilmar Edible Oils BV – lihat <http://www.wilmar-europe.nl/index.htm>) dan Ukraina (Delta Wilmar CIS – lihat <http://www.deltawilmar.com>).
- 172 Wilmar saat ini sedang mendirikan fasilitas pengolahan dan penyimpanan di Stockton, California, yang diperkirakan akan operasional pada tahun 2013 (lihat Wilmar (2013b)).
- 173 Wilmar (2013b)
- 174 Wilmar (2013b)
- 175 Wilmar (2013b): 30
- 176 Lihat misalnya Warc (2013); Minto (2013); website Wilmar, 'About Us'; Wilmar (2010a, b); dan Wilmar (2013b): 30
- 177 website Wilmar, 'About Us'
- 178 website Olenex, 'Company Profile'
- 179 Clariant (2012); Wilmar/Clariant (2013)
- 180 Huntsman Corp (2011)
- 181 website PZ Cussons, 'PZ - Wilmar joint venture'
- 182 ICIS (2008)
- 183 Kellogg Company (2012)
- 184 Wilmar (2012c)
- 185 PT Cahaya Kalbar (2013)
- 186 Martin (2013)
- 187 Godrej (2013)
- 188 Beberapa anak perusahaan Wilmar di luar AS atau pelanggan minyak kelapa sawit mengaku memasok Kraft (lihat misalnya <http://www.golden-sea.cn/yihai/en/main.html>, <http://www.rspo.org/en/member/876>, <http://www.deltawilmar.com/events>); informasi rahasia, salinan diperoleh Greenpeace.
- 189 Neste Oil (2013)
- 190 Wilmar dilaporkan memasok Procter & Gamble dengan mie sabun secara global, dan sejak November 2012 Adani Wilmar membangun pabrik untuk memasoknya ke Procter & Gamble (dan Unilever) di India (sumber: Anand (2012)). Greenpeace telah mengidentifikasi sejumlah contoh spesifik RBD palm stearin yang dipasok ke Procter & Gamble AS melalui pelabuhan San Francisco pada tahun 2012-13 oleh anak perusahaan Wilmar di Indonesia, PT Multi Nabati Sulawesi (sumber: data beacukai AS, melalui Trademining, diakses tanggal 25 Februari 2013).
- 191 Informasi rahasia, salinan diperoleh Greenpeace
- 192 data beacukai AS, melalui Trademining, diunduh Oktober 2013
- 193 Wilmar (2012b): 36
- 194 Wilmar (2012b): 4
- 195 Wilmar (2012b): 51
- 196 RSPO (2013f)
- 197 RSPO (2012)
- 198 Wakil Ketua Eksekutif Wilmar Martua Sitorus telah diklaim sebagai pemilik sebagian dari Ganda Group (CAO (2009)), yang dibangun bersama saudaranya Ganda Sitorus. Jakarta Globe (2012).
- 199 Forest Peoples Programme (2013)
- 200 OCBC (2009)
- 201 Sizer et al (2013b) (konsesi PT Jatim Jaya Perkasa dikaitkan dengan Wilmar oleh para penulis, walau kepemilikan telah berpindah kepada Ganda Group pada tahun 2005); Sizer et al (2013a)
- 202 'Kelompok kami sebagian besar bergantung porsi penjualannya pada dua konsumen besar, Wilmar Group dan Sinar Mas Group. Penjualan ke Wilmar Group dan Sinar Mas Group secara agregat adalah, 56,8% dan 25,3% dari penjualan CPO dan PK dari Group kami untuk FY2011.' Sumber: Bumitama Agri Ltd (2012): 50.
- 203 Bumitama Agri Ltd (2012): 10
- 204 PT Nabatindo Karya Utama, Kalimantan Tengah (sumber: http://www.rspo.org/en/status_of_complaint&cpid=32; http://www.rspo.org/file/NKU_Final_Decision_CP_1Juli2013.pdf), dan PT Ladang Sawit Mas, Kalimantan Barat (sumber: IARI (2013); http://www.rspo.org/file/LSM_Final_Decision_CP1Juli2013.pdf)
- 205 PT Andalan Sukses Makmur – menurut izin lokasinya, perusahaan ini terdaftar pada alamat kantor yang sama dengan Bumitama Agri Ltd. (JL. Melawai Raya No. 10, Kebayoran Baru Jakarta 12160, Indonesia).
- 206 Contohnya, WWF mendokumentasi tiga pabrik milik PT Citra Riau Sarana (Wilmar Group) dekat kompleks hutan Tesso Nilo menerima TBS yang ditanam secara ilegal di dalam kompleks hutan Tesso Nilo, termasuk di dalam taman nasional; dari sana CPO diperdagangkan ke fasilitas Nabati Indonesia milik Wilmar di Dumai. Sumber: WWF Indonesia (2013): 16-20. Pabrik-pabrik Wilmar Group ini terjadwal untuk disertifikasi RSPO pada tahun 2013 tapi tidak diketahui apakah hal ini telah dilakukan. RSPO (2013d).
- 207 WWF Indonesia (2013): 10
- 208 CGF (2010)
- 209 Martin (2013)
- 210 Beberapa anak perusahaan Wilmar di luar AS atau pelanggan minyak kelapa sawit mengaku memasok Kraft (lihat misalnya <http://www.golden-sea.cn/yihai/en/main.html>, <http://www.rspo.org/en/member/876>, <http://www.deltawilmar.com/events>); informasi rahasia, salinan diperoleh Greenpeace.
- 211 Wilmar dilaporkan memasok Procter & Gamble dengan mie sabun secara global, dan sejak November 2012 Adani Wilmar membangun pabrik untuk memasoknya ke Procter & Gamble (dan Unilever) di India (sumber: Anand (2012)). Greenpeace telah mengidentifikasi sejumlah contoh spesifik RBD palm stearin yang dipasok ke Procter & Gamble AS melalui pelabuhan San Francisco pada tahun 2012-13 oleh anak perusahaan Wilmar di Indonesia, PT Multi Nabati Sulawesi (sumber: data beacukai AS, melalui Trademining, diakses tanggal 25 Februari 2013).
- 212 Informasi rahasia, salinan diperoleh Greenpeace
- 213 Perusahaan Kellogg (2012)
- 214 Kebijakan semacam ini akan memastikan perlindungan hutan dan lahan gambut dalam wilayah konsesi perusahaan dan pemasok. Ini termasuk elemen-elemen berikut ini: penilaian dan perlindungan lahan-lahan dengan nilai konservasi tinggi (HCV) dan dengan stok karbon tinggi (HCS); persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (padiatapa) dari semua masyarakat lokal yang terdampak semua pembangunan baru; rencana-rencana pembangunan dan penerapan konservasi yang memperhitungkan bentang alam sekitarnya, pengelolaan perkebunan yang bertanggung jawab, dan pelaporan transparan dari penerapan kebijakan. Golden Agri-Resources (GAR) dan Asia Pulp & Paper (APP) berusaha untuk menerapkan kebijakan semacam ini.
- 215 Anggaran dasar POIG final akan diluncurkan pada bulan November 2013. Usulan anggaran dasar dapat dilihat di <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/photos/forests/2013/Indonesia%20Forests/POIG%20Statement%2028%20Juni%202013.pdf>
- 216 One Map adalah sistem pemetaan yang menstandarkan perhitungan tutupan hutan, penggunaan lahan dan batas administratif yang digunakan oleh berbagai kementerian dan pemerintah lokal – Lihat lebih lanjut di: <http://insights.wri.org/news/2013/05/conversation-nirarta-koni-samadhi-indonesias-forests#sthash.dh95bKFM.dpuf>
- 217 Pendekatan Stok Karbon Tinggi atau High Carbon Stock (HCS) yang cocok di atas penilaian kearifan Nilai Konservasi Tinggi atau High Conservation Value (HCV) dapat digunakan sebagai proxy untuk mengidentifikasi lahan terdegradasi yang sebelumnya adalah hutan. Kriteria lahan terdegradasi harus termasuk identifikasi dan pengecualian hutan dan lahan gambut HCS. Hutan HCS di atas tingkat hutan sekunder yang beregenerasi secara alami dan lahan terdegradasi yang terdapat di atasnya vegetasi semak atau padang rumput. Pendekatan HCS secara efektif mengombinasikan keanekaragaman hayati dan konservasi karbon melalui tujuan mengkonservasi secara ekologis wilayah-wilayah hutan alam. Lihat website Golden Agri-Resources, 'High carbon stock forest conservation' dan Greenpeace International (2013)



**Hutan Suaka Alam
Sungai Sembilang**
1°46'7"S 104°27'7"E
28 Februari 2012



Riau
25 Agustus 2006



Sumatra
16 Oktober 2010

- ▼ **Taman Nasional Sungai Sembilang.**
©Jufri/Greenpeace
- ▶ **Bekas kebakaran hutan baru-baru ini pada lahan gambut yang tersisa karena ditebang habis untuk persiapan perkebunan.**
©Greenpeace/Dithajohn
- ▲ **Perkebunan kelapa sawit muda di atas lahan gambut.**
©Sutton-Hibbert/Greenpeace

Bibliografi

Akronim dst.

Asia-Pacific Resources International Limited (APRIL)

Asia Pulp & Paper (APP)

Consumer Goods Forum (CGF) Forum Barang Konsumen

Crude palm oil (CPO), minyak kelapa sawit mentah

Giga ton (Gt)

Golden Agri-Resources (GAR)

Gas Rumah Kaca (GRK)

Hektar (ha)

High conservation value (HCV), Area Konservasi Tinggi

Mega ton (Mt)

PT Agrindo Indah Persada (PT AIP)

PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP)

PT Rokan Adiraya (PT RAR)

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), Perkumpulan Kelapa Sawit Berkelanjutan

Royal Golden Eagle (RGE)

Sinarmas Forestry (SMF)

tandan buah segar (TBS)

Tiger Conservation Landscape (TCL), Bentang Alam Konservasi Harimau

Ton (t)

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

World Wildlife Fund (WWF)

Data yang digunakan dalam analisis pemetaan Greenpeace:

Tutupan hutan:
Kementerian Kehutanan (2013a)

Kementerian Kehutanan (2013b)

Kementerian Kehutanan (2009a)

Kementerian Kehutanan (2005)

Peta Kawasan hutan:
Kementerian Kehutanan (2013c)

Lahan gambut:
Wahyunto & Subagjo (2003)

Kebakaran 2013:
NASA (2013)

Konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI):
Kementerian Kehutanan (2010a)

Konsesi kelapa sawit:
Kementerian Kehutanan (2010)

Habitat harimau:
WWF (2008)

Tiger Conservation Landscapes:
Dinerstein et al. (2006)

Habitat orangutan:
Wich et al. (2008)

Referensi

Anand N (2012) 'Adani to bring Wilmar products to India' Daily News & Analysis 23 November 2012 http://www.dnaindia.com/money/report_adani-to-bring-wilmar-products-to-india_1768311-all

Ancrenaz M, Marshall A, Goossens B, van Schaik C, Sugardjito J, Gumal M & Wich S (2008) 'Pongo pygmaeus' in IUCN (2013) <http://www.iucnredlist.org/details/17975/0> viewed 24 September 2013

Antara News Bengkulu (2013) 'BKSDA Jambi gagal tangkap Harimau di Muarajambi' 4 Maret 2013 <http://www.antarabengkulu.com/berita/11146/bksda-jambi-gagal-tangkap-harimau-di-muarajambi>

Asia Pulp & Paper (APP) website 'Sustainability' <http://www.asiapulppaper.com/sustainability/vision-2020/targets-and-components> viewed 5 September 2013

Austin K, Sheppard S & Stolle F (2011) 'Indonesia's moratorium on new forest concessions: key findings and next steps', World Resources Institute, February 2012 http://pdf.wri.org/working_papers/indonesia_moratorium_on_new_forest_concessions.pdf

Bumitama Agri Ltd (2012) 'Prospectus Dated 3 April 2012 (Registered by the Monetary Authority of Singapore on 3 April 2012)' <http://ir.bumitama-agri.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=668387>

Office of the Compliance Advisor/Ombudsman (CAO) (2009) 'CAO Audit of IFCs Investments' Office of the Compliance Advisor/Ombudsman (CAO) for the International Finance Corporation (IFC) & Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), Members of the World Bank Group, 19 Juni 2009

Clariant (2012) 'Clariant and Wilmar establish joint venture for amines and selected amines derivatives' press release 26 Oktober 2012 <http://newsroom.clariant.com/clariant-and-wilmar-establish-joint-venture-for-aminers-and-selected-aminers-derivatives/>

Consortium to Revise the HCV Toolkit for Indonesia (2008) 'Toolkit for identification of High Conservation Values in Indonesia' Jakarta, Indonesia, Juni 2008 <http://www.hcvnetwork.org/resources/national-hcv-interpretations/HCV%20Toolkit%20for%20Indonesia-Engversion-final.pdf>

Consumer Goods Forum (CGF) (2010) 'Board resolutions on deforestation and refrigeration' http://sustainability.mycgforum.com/images/sustainability-pic/Board_Resolutions_on_Deforestation_and_Refrigeration.pdf

Delft Hydraulics (2008) 'Kampar Peninsula Science Based Management Support Project Summary Interim Report, April-Desember 2007 Introduction to the SBMS Project and preliminary results to date' Hooijer A (ed) April 2008

Dinerstein E, Loucks C, Heydlauff A, Wikramanayake E, Bryja G, Forrest J, Ginsberg J, Klenzendorf S, Leimgruber P, O'Brien T, Sanderson E, Seidensticker J & Songer M (2006) 'Setting priorities for the conservation and recovery of wild tigers: 2005–2015. A user's guide.' WWF, WCS, Smithsonian and NFWF-STF <http://www.panthera.org/node/1406>

Edwards D, Fisher B & Wilcove DS (2012) 'High Conservation Value or high confusion value? Sustainable agriculture and biodiversity conservation in the tropics' Conservation Letters 5 (2012) 20–27 doi: 10.1111/j.1755-263X.2011.00209.x

Eyes on the Forest (2013) 'Governor detained for forest graft, probe to companies, ministry needed' news report 15 Juni 2013 <http://www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=640>

Forest Peoples Programme (2013) 'The Governor of Jambi Province must take action to tackle unscrupulous conduct of palm oil plantation PT Asiatic Persada' press release 7 Oktober 2013 <http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/news/2013/10/press-release-indonesia-governor-jambi-province-must-take-action-t> viewed 11 Oktober 2013

Forum Harimau Kita (2012) 'Konflik Harimau Sumatera – Manusia: Sumatera 1998–2011' presentation by Wulan Pusparini

Gaveau D & Salim MA (2013a) 'Nearly a quarter of Juni fires in Indonesia occurred in industrial plantations' Centre for International Forestry Research (CIFOR), 30 Juli 2013 <http://blog.cifor.org/18218/research-nearly-a-quarter-of-juni-fires-in-indonesia-occurred-in-industrial-plantations/#.UfkEC2TVyaE>

Gaveau D & Salim MA (2013b) 'Area affected by fire in Riau: CIFOR Analysis' interactive map, CIFOR <http://www.cifor.org/map/fire/> viewed 24 September 2013

Gillison AN (2001) 'Vegetation survey and habitat assessment of the Tesso Nilo Forest Complex' report prepared for WWF-US <http://www.savesumatra.org/app/webroot/upload/report/TessoNiloBiodiversity1.pdf>

Global Forest Watch (GFW) website, <http://www.gfw-beta.org> viewed 11 Oktober 2013

Global Tiger Initiative (2010) 'Global Tiger Recovery Program' http://www.globaltigerinitiative.org/download/St_Petersburg/GTRP_latest.pdf

Global Tiger Initiative (2012) 'Managing tiger conservation landscapes and habitat connectivity: Threats and possible solutions' World Bank, Washington DC, Oktober 2012 http://globaltigerinitiative2013.org/site/wp-content/uploads/2013/05/GTI_Habitat_Report_Layout_1015.pdf

Godrej N (2013) Letter of Nadir B. Godrej, Managing Director of Godrej Ind. Ltd., to Greenpeace India, 13 Juni 2013

Golden Agri-Resources website 'High carbon stock forest conservation' http://www.goldenagri.com.sg/sustainable_hcs.php viewed 26 September 2013

Government of Indonesia (2007) 'Conservation strategy and action plan for the Sumatran tiger (Panthera tigris Sumatrae) Indonesia 2007 – 2017' <http://globaltigerinitiative.org/site/wp-content/uploads/2013/04/Indonesia.pdf>

Government of Indonesia (2008) 'Masterplan for the acceleration and expansion of Indonesia's economic development' <http://www.indonesia-investments.com/projects/government-development-plans/masterplan-for-acceleration-and-expansion-of-indonesias-economic-development-mp3ei/item306>

Government of the Kingdom of Norway and the Government of the Republic of Indonesia (2010) Letter of Intent on 'Cooperation on reducing greenhouse gas emissions from deforestation and forest degradation', 26 May 2010 http://www.norway.or.id/PageFiles/404362/Letter_of_Intent_Norway_Indonesia_26_May_2010.pdf

Greenpeace International (2013) 'Identifying High Carbon Stock (HCS) forest for protection' <http://www.greenpeace.org/international/Global/international/briefings/forests/2013/HCS-Briefing-2013.pdf>

Griffith M (1994) 'Population density of the Sumatran tigers in GLNP', in Tilson RL, Soemarna K, Ramono WS, Lusli S, Traylor-Holzer K & Seal US (1994) Sumatran Tiger Populations and Habitat Viability Analysis, Indonesian Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation and IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group, pp. 93–102

Gummalam P (2013) 'WWF alarmed by oil palm fruit grown in Sumatra National Park'

Jakarta Globe 5 Agustus 2013 <http://www.thejakartaglobe.com/news/wwf-alarmed-by-oil-palm-fruit-grown-in-sumatra-national-park/>
Ho KK (2012) Investor Presentation, Wilmar International Ltd, 9 January 2012 http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/16/164878/Presentation/Wilmar%20Investor%20Presentation.pdf

Huntsman Corp (2011) 'Wilmar to build natural alcohol plant on Huntsman site in Rotterdam' 10 May 2011 http://www.huntsman.com/corporate/Applications/itemrenderer?p_item_id=241466351&p_item_caid=1123

IARI (2013) Letter to RSPO Secretariat and Lim Gunawan Hariyanto, Executive Chairman and CEO of Bumitama Agri Ltd, 22 April 2013

ICIS (2008) 'Wilmar, Sasol finalising 2nd China fatty alcohols JV' 28 February 2008 <http://www.icis.com/Articles/2008/02/28/9104322/wilmar-sasol-finalising-2nd-china-fatty-alcohols-jv.html>

IUCN (2013) IUCN Red List of Threatened Species, version 2013.1 <http://www.iucnredlist.org>
Jakarta Globe (2012) 'The power of collaboration' 6 Agustus 2012 <http://www.thejakartaglobe.com/archive/the-power-of-collaboration/>

Jakarta Globe (2013) 'Indonesian government to revoke palm oil licenses without sustainable credentials' 11 Maret 2013 <http://www.thejakartaglobe.com/business/3872/>

Jakarta Post (2013) 'Rusli Zainal still in charge of Riau' 18 Juni 2013 <http://www.thejakartapost.com/news/2013/06/18/rusli-zainal-still-charge-riau.html>

Jennings S, Nussbaum R, Judd N, Evans T et al (2003) 'The high conservation value forest toolkit' ProForest Desember 2003 <http://www.proforest.net/objects/publications/HCVF/hcvf-toolkit-part-1-final-updated.pdf>

Kellogg Company (2012) 'Kellogg Company And Wilmar International Limited Announce China Joint Venture' <http://newsroom.kelloggcompany.com/2012-09-24-Kellogg-Company-And-Wilmar-International-Limited-Announce-China-Joint-Venture> 24 September 2012

Kinnaird MF, O'Brien TG, Wibisono HT, Sanderson EW & Woolmer G (2003) 'Deforestation trends in a tropical landscape and implications for endangered large mammals' Conservation Biology 17: 245-257

Komisi Pemberantasan Korupsi (2010) 'Corruption impact assessment: Titik korupsi dalam lemahnya kepastian hukum ada kawasan hutan' ('Corruption in the presence of weak legal certainty'), discussed in UN Development Program Indonesia (2013) 'Participatory governance assessment: The 2012 Indonesia forest, land, and REDD+ governance index' <http://www.undp.org/content/dam/indonesia/docs/envi/PGA%20Report%20English%20Final.pdf>, p. 23

Lang T (2013) 'Indonesia: Governor of Aceh puts forests under threat' REDD-monitor.org 13 February 2013 <http://www.redd-monitor.org/2013/02/13/indonesia-governor-of-aceh-puts-forests-under-threat/>

Lapidus D (2013) 'Catapult's Glenn Hurowitz on Bloomberg TV: Who's responsible for Singapore forest fires?' 9 Juli 2013 <http://www.catapult-campaigns.com/catapults-glenn-hurowitz-on-bloomberg-tv-whos-responsible-for-singapore-forest-fires/>

Linkie M, Martyr DJ, Holden J, Yanuar A, Hartana AT, Sugardjito J & Leader-Williams N (2003) 'Habitat destruction and poaching

threaten the Sumatran tiger in Kerinci Seblat National Park, Sumatra' Oryx 37:41-48

Linkie M, Wibisono HT, Martyr DJ & Sunarto S (2008) 'Panthera tigris ssp. sumatrae' in IUCN (2013) <http://www.iucnredlist.org/details/15966/0> viewed 20 September 2013
Lubis AM (2013) 'Wilmar's oil refinery project to kick off in East Kalimantan' Jakarta Post 27 Juli 2013 <http://www.thejakartapost.com/news/2013/07/27/wilmar-s-oil-refinery-project-kick-east-kalimantan.html> accessed 26 Agustus 2013

Martin R (2013) E-mail to Greenpeace USA, Ron Martin, VP Global Sustainability & Social Responsibility, Colgate-Palmolive
Mielke (2013) ISTA Mielke GmbH, 'Oil World Statistics Update Juni 2013' <http://www.oilworld.biz>

Ministry of Agriculture (1996) Keputusan Menteri Pertanian / Decree of the Minister of Agriculture NOMOR.786/Kpts/KB.120/10/96
Ministry of Agriculture (2009) Statistik Perkebunan 2008-2010 / Tree Crop Estate Statistics 2008-2010' Direktorat Jenderal Perkebunan, Ministry of Agriculture, Jakarta, Indonesia

Ministry of Agriculture (2013a) 'Buku Statistik Perkebunan Tahun / Plantation Statistic Year Book 2008-2012' Direktorat Jenderal Perkebunan / Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture Indonesia <http://www.deptan.go.id/infoeksekutif/bun/BUN-asem2012/Produksi-KelapaSawit.pdf>

Ministry of Agriculture (2013b) Export data 2012, Data and Information Center, Ministry of Agriculture, accessed 23 Agustus 2013

Ministry of Agriculture (2013c) 'Peremajaan Perkebunan Rakyat Kelapa Sawit: Masalah dan Peluang', General Directorate of Plantations 24 May 2013 <http://ditjenbun.deptan.go.id/tahun/berita-164-peremajaan-perkebunan-rakyat-kelapa-sawit-masalah-dan-peluang.html>

Ministry of Forestry (2005) 'Landcover Indonesia 2003' Forestry Planning Agency of the Ministry of Forestry, 2005

Ministry of Forestry (2007) 'Conservation strategy and action plan for the Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae) 2007-2017' Regulation of Minister of Forestry No. P42/Menhut-II/2007 <http://globaltigerinitiative.org/site/wp-content/uploads/2013/04/Indonesia.pdf>

Ministry of Forestry (2009) 'Landcover Indonesia 2006' Forestry Planning Agency of the Ministry of Forestry, 2009

Ministry of Forestry (2010a) HTI concession maps, provided by the Planning Department of the Ministry of Forestry, Indonesia (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia) <http://appgis.dephut.go.id/appgis/kml.aspx> downloaded September 2010. Updated using 1) Ministry of Forestry (2010b) Pemanfaatan Hutan, Data dan Informasi, Tahun 2010, Ministry of Forestry Indonesia, November 2010 http://www.dephut.go.id/files/Buku_pemanfaatan_2010.pdf and 2) Ministry of Forestry (2011), online WebGIS Kehutanan, online interactive map <http://webgis.dephut.go.id/ditplanjs/index.html> accessed 12 May 2011

Ministry of Forestry (2010c) Agriculture plantation maps, provided by the Planning Department of the Ministry of Forestry, Indonesia. Downloaded as Google Earth files (kml) from <http://appgis.dephut.go.id/appgis/kml.aspx> 29 Juli 2010, supplemented and updated in

Riau and Kalimantan with data gathered from provincial planning agencies (BAPEDA - Badan Perencanaan Daerah tingkat provinsi).

Ministry of Forestry (2012) 'Daftar nama-nama IPHHK dan rekapitulasi realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2011 di wilayah BP2HP pekanbaru kapasitas lebih dari 6.000 M³/tahun' (Period up to 31 Desember 2011) <http://bpphp3.dephut.go.id/main/wp-content/uploads/2011/11/RPBI-LEBIH-6.pdf>

Ministry of Forestry (2013a) 'Peta Penutupan Lahan / Landcover map 2009' Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan-Kementerian Kehutanan Republik Indonesia / Directorate General of Forest Planning, Ministry of Forestry, 2013. Provided by the Ministry to Greenpeace Southeast Asia in May 2013.

Ministry of Forestry (2013b) 'Peta Penutupan Lahan / Landcover map 2011' Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan-Kementerian Kehutanan Republik Indonesia / Directorate General of Forest Planning, Ministry of Forestry, 2013. Provided by the Ministry to Greenpeace Southeast Asia in April 2013.

Ministry of Forestry (2013c) Landuse Planning Map, Directorate General of Forest Planning, Ministry of Forestry; downloaded from <http://appgis.dephut.go.id/appgis/kml.aspx> September 2013

Ministry of Forestry / Departemen Kehutanan (2009b) 'Orangutan Indonesia Conservation Strategies and Action Plan 2007-2017' concerning Regulation of Minister of Forestry No. P53/Menhut-II/2007 http://www.embassyofindonesia.org/features/pdf/Orangutan_National_Action_Plan_2007-2017%2Bilingual%29.pdf

Ministry of Forestry / Global Tiger Initiative (2010) 'National Tiger Recovery Program - Indonesia' Juli 2010 <http://globaltigerinitiative.org/publication/national-tiger-recovery-program-indonesia/>

Minto R (2013) 'Chart of the week: consumer goods in China, moving fast' Financial Times 28 January 2013 <http://blogs.ft.com/beyond-brics/2013/01/28/chart-of-the-week-consumer-goods-in-china-moving-fast/?Authorised=false#axzz2hRkG27i2>

NASA (2013) 'Fire Information for Resource Management System' (FIRMS), NASA <https://earthdata.nasa.gov/data/near-real-time-data/firms>

National Council on Climate Change (2010a) 'Indonesia's greenhouse gas abatement cost curve' 15 Agustus 2010 <http://forestclimatecenter.org/files/2010-08%20Indonesia-s%20Greenhouse%20Gas%20Abatement%20Cost%20Curve.pdf>

National Council on Climate Change (2010b) 'Setting a course for Indonesia's green growth' Press conference presentation 6 September 2010 <http://forestclimatecenter.org/files/2010-09-06%20Setting%20a%20Course%20for%20Indonesia-s%20Green%20Growth%20-%20DNDPI%20Press%20Conference%20Presentation.pdf>

Neste Oil (2013) Presentation by Simo Honkanen, Senior Vice President of Sustainability at Neste Oil, at their annual general meeting in Helsinki, Finland, 4 April 2013

OCBC (2009) 'Wilmar Int'l Ltd. Resilient integrated agri-business model' OCBC Investment Research, 23 Juni 2009

Olenex website 'Company Profile' <http://www olenex.com/page1.php> accessed 14 Oktober 2013

Panthera website 'Priority tiger conservation landscapes' <http://www.panthera.org/node/1406> viewed 19 September 2013

PT Agrindo Indah Persada (AIP) (2009a) 'RSPO New planting procedures: Summary report of assessments' http://www.rsपो.org/_v2/file/RSPO-NPP%20Report%20PT%20AIP-Assessment%20findings.pdf

PT Agrindo Indah Persada (2009b) 'RSPO New planting procedures: Summary report of planning and management' http://www.rsपो.org/_v2/file/RSPO-NPP%20Report%20PT%20AIP-Monitoring%20and%20Management%20plan.pdf

PT Cahaya Kalbar (2013) 'Notes to the Financial Statements, Years ended Desember 31, 2012 and 2011' 11 Maret 2013

PT Data Consult (2011) 'Indonesian Commercial Newsletter - Monthly Report' 1 Juli 2011 <http://www.datacon.co.id/PalmOil-2011List.html>

Pusdatin (2013) 'Palm oil exports, 2012' Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian' downloaded Agustus 2013

PZ Cussons website 'PZ - Wilmar joint venture' <http://www.pzcussons.com/content/pz-wilmar-joint-venture>

Rondonuwu O (2011) 'Indonesia finally signs forest clearing moratorium', Reuters, 19 May 2011 <http://www.reuters.com/article/2011/05/19/usindonesia-environment-moratoriumidUSTRE74I2MT20110519>

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) (2012) 'Code of Conduct for Members of the Roundtable on Sustainable Palm Oil' 22 November 2012 http://www.rsपो.org/files/resource_centre/keydoc/3%20en_Code%20of%20conduct%20for%20members%20of%20the%20RSPO.pdf

RSPO (2013a) 'Statement from Darrel Webber, RSPO Secretary General, on the forest fires in Sumatra' 15 Juli 2013 http://www.rsपो.org/news_details.php?nid=176

RSPO (2013b) 'Complaint on PT Jatim Jaya Perkasa' 16 Juli 2013 http://www.rsपो.org/en/status_of_complaint&cpid=35

RSPO (2013c) 'Statement from the RSPO on the importance of transparent and responsible sourcing of fresh fruit bunches' 31 Juli 2013 http://www.rsपो.org/news_details.php?nid=181

RSPO (2013d) 'Annual Surveillance Audit: PT Mustika Sembuluh' http://www.rsपो.org/sites/default/files/Mustika_Sembuluh1stASA_report_TUVR_23052012doc-82.pdf

RSPO (2013e) Letter from RSPO to Duta Palma Nusantara 9 May 2013 http://www.rsपो.org/file/Letter_to_DutaPalma_NusantaraTermination_9May2013CPRFinal.pdf

RSPO (2013f) 'Principles and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil 2013' 25 April 2013 http://www.rsपो.org/file/PnC_RSPO_Rev1.pdf

RSPO website 'Who is RSPO?' http://www.rsपो.org/en/who_is_rsपो viewed 18 Juli 2013
RSPO website 'PT Inti Indosawit Subur Uku' <http://www.rsपो.org/backup/ca/2778> viewed 20 September 2013

RSPO website 'PT Jatim Jaya Perkasa' <http://www.rsपो.org/en/member/241> viewed 20 September 2013

RSPO website 'RSPO Worldwide Impact' http://www.rsपो.org/en/RSPO_Worldwide_Impact viewed 18 Juli 2013

RSPO website 'Why RSPO certification' http://www.rsपो.org/en/why_rsपो_certification

viewed 18 Juli 2013

Sateri (2012) 'Continuing connected transaction in relation to the renewal of the sales framework agreement and notice of special general meeting' Sateri Holdings Ltd 6 September 2012 <http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2012/0905/LTN20120905791.pdf> viewed 30 September 2013

Shepherd CR & Magnus N (2004) 'Nowhere to hide: The trade in Sumatran tiger' TRAFFIC Southeast Asia, Maref 2004 http://awsassets.panda.org/downloads/sumatran_tigers.pdf

Siagian SP (2008) 'Third generation human rights in the palm oil industry: RSPO as a global multi stakeholder organization' Institute of Social Studies November 2008 <http://www.google.fr/url?sa=t&rcft=j&q=&esrc=s&source=news&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fthesis.eur.nl%2Fpub%2F7141%2F5aurlin%2520Pandapotan%2520Siagian%2520HDS.pdf&ei=UCpcUr3UlcGW0AWExlGABg&usq=AFQjCNFU9COChRvNx0upPnZfTEHRCuKcUA&sig=C1ly7b5K3Ao2MILQefh6A&bv=n=53899372.d.d2k&cad=rja>

Singleton I, Wich SA & Griffiths M (2008) 'Pongo abelii' in IUCN (2013) <http://www.iucnredlist.org/details/39780/0> viewed 24 September 2013

Sizer N, Stolle F & Minnemeyer S (2013a) 'Peering through the haze: What data can tell us about the fires in Indonesia' WRI Insights blog 21 Juni 2013 <http://insights.wri.org/news/2013/06/peering-through-haze-what-data-can-tell-us-about-fires-indonesia> accessed 17 Agustus 2013

Sizer N, Stolle F & Minnemeyer S (2013b) 'WRI releases updated data on the fires in Indonesia', WRI Insights blog 24 Juni 2013 <http://insights.wri.org/news/2013/06/wri-releases-updated-data-fires-indonesia> accessed 17 Agustus 2013

Sukanto Tanoto website, 'Royal Golden Eagle' <http://www.sukantotanoto.net/rge> viewed 10 Oktober 2013

Sunarto S, Kelly MJ, Parakkasi K, Klenzendorf S, Septayuda E & Kurniawan H (2012) 'Tigers need cover: Multi-scale occupancy study of the big cat in Sumatran forest and plantation landscapes' PLoS ONE 7(1): e30859 doi:10.1371/journal.pone.0030859 <http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0030859>

Sunarto, Kelly MJ, Klenzendorf S, Vaughan MR, Zufahmi, M B Hutajulu & Parakkasi K (2013) 'Threatened predator on the equator: multi-point abundance estimates of the tiger Panthera tigris in central Sumatra' Oryx 47(2):211–220

Tempo (2013) 'Interview: Kuntoro Mangkusubroto' 16–22 September 2013

The St. Petersburg Declaration on Tiger Conservation (2010), Saint Petersburg, Russia, 23 November 2010 http://www.globaltigerinitiative.org/download/St_Petersburg/St_Petersburg_Declaration_English.pdf

Uryu Y & Budiman A (2007) 'Can ALOS help save Sumatra's peatlands and reduce carbon emissions in the process?' ALOS Kyoto & Carbon Initiative 7th Science Team Meeting, Tsukuba, Japan, 18 January 2007 http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/kyoto/jan2007/pdf/3-08_Uryu-WWF_KC7.pdf

Uryu Y, Mott C, Foead K, Yulianto A, Budiman A et al (2008) 'Deforestation, Forest Degradation, Biodiversity Loss and CO2 Emissions in Riau, Sumatra, Indonesia' WWF Indonesia Technical Report, Jakarta, Indonesia http://assets.panda.org/downloads/riau_co2_report__wwf_id_27feb08_en_lr.pdf

Wahyunto SR & Subagio H (2003) 'Peta luas sebaran lahan gambut dan kandungan karbon di pulau Sumatera / Maps of area of peatland distribution and carbon content in Sumatera, 1990 – 2002' Wetlands International – Indonesia Programme & Wildlife Habitat Canada (WHC) <http://www.wetlands.or.id/PDF/buku/Atlas%20Sebaran%20Gambut%20Sumatera.pdf>

Warc (2013) 'FMCG sector evolves in China' 30 January 2013 http://www.warc.com/LatestNews/News/FMCG_sector_evolves_in_China_news?ID=30945

Wibisono HT & Pusparini W (2010) 'Sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae): A review of conservation status' Integrative Zoology 5(4): 313–23

Wibisono HT, Linkie M, Guillaere-Arroita G, Smith JA, Sunarto et al (2011) 'Population status of a cryptic top predator: An island-wide assessment of tigers in Sumatran rainforests' PLoS ONE 6(11): e25931 doi:10.1371/journal.pone.0025931 <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3206793/>

Wich SE et al (2008) 'Distribution and conservation status of the orang-utan (Pongo spp.) on Borneo and Sumatra: How many remain?' 2008 Fauna & Flora International, Oryx 42(3), 329–339 doi:10.1017/S003060530800197X, with updates by Wich, Singleton and Utami

Wilmar (2006) 'Wilmar set to be Asia's leading agribusiness group through US\$4.3 billion planned merger and restructuring' Wilmar International Ltd News Release 14 Desember 2006 http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/16/164878/Media/WilmarPressRelease14.12.06.pdf

Wilmar (2008) 'Annual Report 2007' 15 April 2008 http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/16/164878/Annual%20Reports/WILMAR_AR2007.pdf

Wilmar (2010a) 'Acquisition of Benso Oil Palm Plantation Ltd and other assets in Ghana by Wilmar Africa Limited' announcement 27 May 2010 http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/16/164878/SGX/2010/SGXANNAcquisition_27May2010.pdf

Wilmar (2010b) 'Joint Venture between Wilmar and Cussons to Establish a Palm Oil Refinery and Food Ingredients Business in Nigeria' news release 20 Desember 2010 http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/16/164878/Media/20101220%20-%20Joint%20Venture%20between%20Wilmar%20and%20Cussons%20to%20Establish%20a%20Palm%20oil%20Refinery%20and%20Food%20Ingredients%20Business%20in%20Nigeria.pdf

Wilmar (2012a) 'Annual Report 2011' 4 April 2012 http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/16/164878/Annual%20Reports/Wilmar%20International%20Limited%20AR%202011.pdf

Wilmar (2012b) 'Staying the Course through Challenging Times: Sustainability Report 2011' http://www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/Wilmar_SR2011.pdf

Wilmar (2012c) Promotional video <http://v.dayoo.com/afterMediaFileAction.do?method=getPlayMedia&fileId=59326>

Wilmar (2013a) '4Q2012 Results Briefing' 22 February 2013 <http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9MTcyOTQ5FENoaWxkSUQ9LTF8VHwZT0z&t=1>

Wilmar (2013b) 'Annual Report 2012' 6 April 2013 http://media.corporate-ir.net/media_files/irol/16/164878/Wilmar_International_Limited_AR_2012.pdf

Wilmar (2013c) 'Wilmar International fact sheet' <http://www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2013/08/Wilmar-Fact-Sheet-30-Jun-2013.pdf>

Wilmar (2013d) Letter to Bustar Maitar, Greenpeace, 26 Juli 2013

Wilmar (2013e) Letter to Bustar Maitar, Greenpeace, from Khoo Hong Kuok, 10 Oktober 2013

Wilmar website 'About Us' <http://www.adaniwilmar.com/aboutus.php> accessed 10 Oktober 2013

Wilmar website 'Corporate Profile' <http://www.wilmar-international.com/who-we-are/corporate-profile/> accessed 10 Oktober 2013

Wilmar website 'Merchandising & Processing, Palm & Laurics' <http://www.wilmar-international.com/our-business/merchandising-processing/palm-laurics/> accessed 10 Oktober 2013

Wilmar/Clariant (2013) 'Clariant and Wilmar Receive Merger Clearance for the Establishment of the Joint Venture for Global Amines', Media Release, 18 Juli 2013 <http://hugin.info/100166/R/1714623/569442.pdf>

World Resources Institute CAIT 2.0 <http://cait2.wri.org/wri> viewed 19 September 2013

WWF (2008) Tiger habitat map <http://www.savesumatra.org/index.php/newspublications/map/0/Species%20Distribution%20Map> downloaded May 2010

WWF Indonesia (2010) 'Sumatra's forests, their wildlife and the climate: Windows in time: 1985, 1990, 2000 and 2009' Juli 2010 (updated in Desember 2010) http://awsassets.wwf.or.id/downloads/wwf_indonesia__2010__sumatran_forests_wildlife_climate_report_for_dkn__bappenas.pdf

WWF Indonesia (2013) 'Palming off a national park: Tracking illegal oil palm fruit in Riau, Sumatra' <http://wwf.panda.org/?209261/REPORT-Palming-off-a-National-Park-Tracking-Illegal-Palm-Oil-Fruit-in-Riau-Sumatra>

Yudhoyono, Susilo Bambang (President of Indonesia) (2009) Speech to G20 Summit, 25 September 2009 <http://forestclimatecenter.org/files/2009-09-25%20Intervention%20by%20President%20SBY%20on%20Climate%20Change%20at%20the%20G-20%20Leaders%20Summit.pdf>

Menutupi kredit

Penutup depan:
Teratas: ©Ifansasti/Greenpeace
Paling bawah: ©Steve Winter/
National Geographic/Getty
Images

Tunggakan:
©Hilton/Greenpeace

Tulang belakang:
©Novis/Greenpeace

Greenpeace adalah organisasi kampanye global yang bertindak untuk mengubah sikap dan perilaku, melindungi dan mengkonservasi lingkungan dan mempromosikan perdamaian.

Greenpeace berkomitmen untuk menghentikan perubahan iklim.

Kami berkampanye untuk melindungi hutan alam yang tersisa di dunia serta tumbuhan, satwa dan masyarakat yang bergantung padanya.

Kami menginvestigasi, mengekspos dan mengkonfrontasi perdagangan produk-produk yang menyebabkan pengrusakan hutan dan perubahan iklim.

Kami menantang pemerintah dan industri untuk menghentikan peran mereka dalam pengrusakan hutan dan perubahan iklim.

Kami mendukung hak masyarakat yang hidup di hutan.

Efektivitas kami terletak dalam uniknya kebebasan kami dari ketergantungan dari pendanaan dari pemerintah dan korporasi.



GREENPEACE

Oktober 2013
JN 460

Published by Greenpeace International
Ottho Heldringstraat 5
1066 AZ Amsterdam
The Netherlands

Greenpeace Southeast Asia, Indonesia
Jl. KH. Abdullah Syafi'ie No. 47
Tebet Timur
Jakarta 12820
Indonesia

enquiries@greenpeace.org
www.greenpeace.org/licencetokill

Ph. +62 21 8378 1701
Fax. +62 21 8378 1702